PROSES PEMBUKTIAN OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM UNTUK MELAKUKAN PENUNTUTAN DILIHAT DARI PERAN KORBAN DALAM TERJADINYA TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR (STUDI KASUS TUNTUTAN JAKSA PENUNTUT UMUM NO. REG. PERKARA : PDM-05/PEKAN/01/2019)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

OLEH :

DESIKA RIA RAUN EMPIYANA
NPM : 151010351

PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2020

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Yang BertandaTangan di bawahini :

Nama	:	DESIKA RIA RAUN EMPIYANA
NPM	:	151010351
Fakultas	:	HUKUM
Program Studi	:	ILMU HUKUM
Tempat/Tanggal Lahir	:	KANDIS / 26 DESEMBER 1996
AlamatRumah	:	JL. AIR DINGIN, MARPOYAN, PEKANBARU.
JudulSkripsi	:	PROSES PEMBUKTIAN OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM UNTUK MELAKUKAN PENUNTUTAN DILIHAT DARI PERAN KORBAN DALAM TERJADINYA TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR (STUDI KASUS TUNTUTAN JAKSA PENUNTUT UMUM NO. REG. PERKARA : PDM-05/PEKAN/01/2019)

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, orisinil, dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya Skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek Skripsi / karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Serjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 03 Maret 2020

Yang menyatakan,

METERAI TEMPEL 55A2BAHF394219568 6000 ENAM RIBU RUPIAH

DESIKA RIA RAUN EMPIYANA

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

No. Reg. 375/II/UPM FH UIR 2020

Paper ID. 1285080846 / 30%

Sertifikat

ORIGINALITAS PENELITIAN

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Desika Ria Raun Empiyana

151010351

Dengan Judul :

Proses Pembuktian Oleh Jaksa Penuntut Umum Untuk Melakukan Penuntutan Dilihat Dari Peran Korban Dalam Terjadinya Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Dibawah Umur (Studi Kasus Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-05/PEKAN/01/2019)

Telah lolos Similarity sebesar maksimal 30%

Pekanbaru, 2 April 2020

Wakil Dekan Bidang Akademik
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H., C.L.A.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

No. Reg. 375/II/UPM FH UIR 2020

Paper ID. 1285080846 / 30%

Sertifikat

ORIGINALITAS PENELITIAN

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Desika Ria Raun Empiyana

151010351

Dengan Judul :

Proses Pembuktian Oleh Jaksa Penuntut Umum Untuk Melakukan Penuntutan Dilihat Dari Peran Korban Dalam Terjadinya Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Dibawah Umur (Studi Kasus Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-05/PEKAN/01/2019)

Telah lolos Similarity sebesar maksimal 30%

Pekanbaru, 2 April 2020

Wakil Dekan Bidang Akademik
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H., C.L.A.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS HUKUM

Alamat : Jalan KaharuddinNasution No. 113, PerhentianMarpoyanPekanbaru, 28284, Riau
Telp : (0761) 72127, Fax : (0761) 674834 – 72127
Website : law.uir.ac.id – e-mail : law@uir.ac.id

Berakreditasi "A" Berdasarkan SK BAN-PT No. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap :

Nama : Desika Ria Raun Empiyana

NPM : 151010351

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Pembimbing I : Heni Susanti, S.H., M.H

Judul Skripsi : Proses Pembuktian Oleh Jaksa Penuntut Umum Untuk Melakukan Penuntutan Dilihat Dari Peran Korban Dalam Terjadinya Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Dibawah Umur (Studi kasus Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-05/PEKAN/01/2019)

Dengan perincian sebagai berikut

Tanggal	Berita Bimbingan	Paraf Pembimbing
03-12-2019	- Masukkan cover, daftar isi, kata pengantar. - Perbaiki abstrak. - Tambah literatur.	
10-12-2019	- Tanda tangani daftar isi Hapus kata Dr di Bab II hal. 25 - Buat bodynote di hal. 43, hal.44,hal. 48,hal. 49 dan hal.51. -Masukkan undang –undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban pada Bab II. - Tambah jurnal dan tulisan dosen.	

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS HUKUM

Alamat : Jalan KaharuddinNasution No. 113, PerhentianMarpoyanPekanbaru, 28284, Riau
Telp : (0761) 72127, Fax : (0761) 674834 – 72127
Website : law.uir.ac.id – e-mail : law@uir.ac.id

Berakreditasi "A" Berdasarkan SK BAN-PT No. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

12-12-2019	- Tambahkan literatur jurnal pada Bab II dibagian Hubungan Korban Kejahatan dan pelaku kejahatan. - Perbaiki Bab III. -Buat bodynote di hal.59.	
27-02-2020	-Hilangkan kata mengenai di hal.75 bagian kesimpulan. -Acc pembimbing dan dapat diperbanyak.	

Pekanbaru, 03 Maret 2020

Mengetahui

a.n Wakil Dekan I

Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS HUKUM

Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau
Telp. (0761) 72127Fax. (0761) 674834, 721 27

FS 671471

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO:217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

PROSES PEMBUKTIAN OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM UNTUK MELAKUKAN PENUNTUTAN DILIHAT DARI PERAN KORBAN DALAM TERJADINYA TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR (STUDI KASUS TUNTUTAN JAKSA PENUNTUT UMUM NO. REG. PERKARA : PDM-05/PEKAN/01/2019)

Desika Ria Raun Empiyana

NPM : 151O1O351

Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing I

Heni Susanti, S.H., M.H.

Mengetahui :

Dekan,

Dr. Admiral, S.H., M.H.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS HUKUM

Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

FS 671471

BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, ***Nomor : 073/KPTS/FH-UIR/2020 Tanggal 14 April 2020***, pada hari ini ***Rabu tanggal 15 April 2020*** telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama	:	Desika Ria Raun Empiyana
N P M	:	151010351
Program Study	:	Ilmu Hukum
Judul Skripsi	:	Proses Pembuktian Oleh Jaksa Penuntut Umum Untuk Melakukan Penuntutan Dilihat Dari Peran Korban Dalam Terjadinya Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Dibawah Umur (Studi Kasus Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : Pdm - 05.Pekan/01/2019)
Tanggal Ujian	:	15 April 2020
Waktu Ujian	:	10.00 – 11.00 WIB
Tempat Ujian	:	Ruang Sidang Fak. Hukum UIR
IPK	:	
Predikat Kelulusan	:	

Dosen Penguji	Tanda Tangan
1. Yuheldi, S.H., M.H.	1.
2. Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H.	2.
3. Dr. Riadi Asra Rahmad, S.H., M.H.	3.
Notulen	
4. Erlina, S.H., M.H	4.

Pekanbaru, 15 April 2020
Dekan Fakultas Hukum UIR

Dr. Admiral, S.H., M.H
NIK. 080102332

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 0342/Kpts/FH/2019
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Menimbang
1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas , perlu ditunjuk pembimbing I dan II yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut.
2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing I dan II yang tetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.

Mengingat
1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5 Permenristek Dkti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
7 SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

M E M U T U S K A N

Menetapkan
1 Menunjuk

Nama	:	Heni Susanti, S.H., M.H.
NIP/NPK	:	16 03 02 535
Pangkat/Jabatan	:	Penata Muda Tingkat I/ III/b
Jabatan Fungsional	:	Asisten Ahli
Sebagai	:	Pembimbing Penulisan Skripsi mahasiswa
Nama	:	DESIKA RIA RAUN EMPIYANA
NPM	:	15 101 0351
Jurusan/program studi	:	Ilmu Hukum /Hukum Pidana
Judul skripsi	:	PROSES PEMBUKTIAN OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM UNTUK MELAKUKAN PENUNTUTAN DILIHAT DARI PERAN KORBAN DALAM TERJADINYA TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR (STUDI KASUS TUNTUTAN JAKSA PENUTUT UMUM NO. REG. PERKARA. PDM. 05/PEKAN/01/2019)

2 Tugas-tugas pembimbing I dan pembimbing II adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 3 Desember 2019
Dekan

Dr. Admiral, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :
1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Depertemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

NOMOR : 073/KPTS/FH-UIR/2020
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Menimbang :
1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
   a. Nomor : 232/U/2000 c. Nomor : 176/U/2001
   b. Nomor : 234/U/2000 d. Nomor : 045/U/2002
5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2009
8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
   a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998 b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989 c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :

N a m a	:	Desika Ria Raun Empiyana
N.P.M.	:	151010351
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Judul Skripsi	:	Proses Pembuktian Oleh Jaksa Penuntut Umum Untuk Melakukan Penuntutan Dilihat Dari Peran Korban Dalam Terjadinya Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Dibawah Umur (Studi Kasus Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : Pdm - 05.Pekan/01/2019)

Dengan susunan tim penguji terdiri dari

Yuheldi, S.H., M.H.	:	Ketua merangkap penguji materi skripsi
Dr. Zulkarnain S, S.H , M.H.	:	Anggota merangkap penguji sistimatika
Dr. Riadi Asra Rahmad, S.H., M.H.	:	Anggota merangkap penguji methodologi
Erlina, S.H., M.H	:	Notulis

2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal 14 April 2020
Dekan,

Dr. Admiral, S.H., M.H
NIK. 080102332

Tembusan disampaikan kepada :
1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Pertinggal

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

ABSTRAK

Dalam melakukan penuntutan tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur Jaksa Penuntut Umum harus membuktikan terlebih dahulu perbuatan terdakwa agar tidak terjadinya ketimpangsiuran sehingga dalam memberikan tuntutan pidananya sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa berdasarkan keterangan yang diperoleh selama di persidangan yang dimana dalam perbuatan tersebut tidak hanya terdakwa yang bersalah tetapi juga dilihat dari peranan korban dalam terjadinya tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur.

Masalah pokok dalam penelitian ini adalah bagaimana proses pembuktian oleh jaksa penuntut umum untuk melakukan penuntutan dilihat dari peran korban dalam terjadinya tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur (studi kasus tuntutan jaksa penuntut umum No. Reg. Perkara : PDM-05/PEKAN/01/2019) dan apa saja yang menjadi hambatan dalam proses pembuktian oleh jaksa penuntut umum untuk melakukan penuntutan dilihat dari peran korban dalam terjadinya tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur (studi kasus tuntutan jaksa penuntut umum No. Reg. Perkara : PDM-05/PEKAN/01/2019).

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum observasi atau survey yang dilakukan dengan wawancara beberapa narasumber yang berkompeten dan berhubungan dengan penulisan skripsi ini. Data disajikan dalam bentuk uraian yang disusun secara sistematis dengan analisis kuantitatif.

Hasil penelitian proses pembuktian oleh jaksa penuntut umum untuk melakukan penuntutan dilihat dari peran korban dalam terjadinya tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur (studi kasus tuntutan jaksa penuntut umum no. reg. perkara : pdm-05/pekan/01/2019) sudah memenuhi syarat formil dan materil serta sudah sesuai dengan ketentuan yang diatur didalam KUHP berdasarkan keterangan saksi-saki, surat *visum et repertum,* keterangan terdakwa serta barang-barang bukti. Hambatannya yaitu berkas acara penyidikan yang diserahkan oleh penyidik kepada jaksa penuntut umum tidak menguraikan secara jelas mengenai peranan korban dalam terjadinya tindak pidana, belum adanya pengaturan secara tegas dan jelas mengenai masalah peranan korban, kurangnya partisipasi korban dalam proses persidangan dan masalah tekhnis yuridis yang tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Penuntut umum menuntut terdakwa Antonius Rajagukguk dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun. Penulis berpendapat tuntutan tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan karena penuntut umum tidak menuntut terdakwa dengan pidana penjara minimal sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 paling singkat 5 (lima) tahun penjara dimana dalam tindak pidana tersebut adanya peran korban, sehingga penuntut umum harus mempertimbangkan dalam memberikan tuntutannya. Penuntut umum juga harus memberikan pendampingan bagi anak korban tindak pidana persetubuhan agar dapat memberikan keterangan yang jelas demi terciptanya keadilan bagi korban, terdakwa dan masyarakat.

Kata kunci : Jaksa dan Penuntut Umum, Pembuktian, Peranan korban.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

ABSTRACT

In prosecuting sexual offenses against minors, the Public Prosecutor must first prove the defendant's actions so that there is no confusion so as to provide criminal charges in accordance with the actions committed by the defendant based on information obtained during the trial which in the act was not only the defendant the guilty but also seen from the role of the victim in the occurrence of a crime of sexual intercourse with a minor.

The main problem in this research is how the process of evidence by the public prosecutor to prosecute is seen from the role of the victim in the occurrence of sexual offenses against minors (case study of prosecutors' demands No. Reg. Case: PDM-05 / PEKAN / 01 / 2019) and what are the obstacles in the evidentiary process by the public prosecutor to carry out the prosecution is seen from the role of the victim in the occurrence of sexual offenses against minors (case study of the prosecutor's claim No. Reg. Case No.: PDM-05 / PEKAN / 01/2019).

This type of research used in this study is observational or survey legal research conducted by interviewing several competent speakers and related to the writing of this thesis. Data is presented in the form of a description that is systematically compiled with quantitative analysis.

The results of -the verification process by the public prosecutor to carry out the prosecution are seen from the role of the victim in the occurrence of sexual offenses against minors (case study of the prosecutor's claim of the prosecutor case number: pdm-05 / week / 01/2019) fulfilling the requirements formal and material as well as in accordance with the provisions stipulated in the Criminal Code based on witness-witness statements, visum et repertum letters, statements of the defendant and evidence. The obstacles are that the investigation file submitted by the investigator to the public prosecutor does not clearly describe the role of the victim in the occurrence of a crime, there is no explicit and clear regulation regarding the problem of the role of the victim, the lack of victim participation in the trial process and juridical technical issues that are not appropriate with applicable law. The public prosecutor charged defendant Antonius Rajagukguk with imprisonment for 9 (nine) years. The author is of the opinion that the claim does not reflect a sense of justice because the public prosecutor does not sue the defendant with a minimum imprisonment as stated in Article 81 paragraph (2) of Law Number 17 Year 2016 at least 5 (five) years in prison in which there is a role of the victim in the crime , so the public prosecutor must consider in giving their demands. The public prosecutor must also provide assistance to the child victims of sexual intercourse in order to provide clear information for the creation of justice for victims, defendants and the community.

Key words: Prosecutors and Public Prosecutors, Evidence, Role of the victim.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena rahmat dan hidayah-nya, penulis akhirnya dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **"Proses Pembuktian Oleh Jaksa Penuntut Umum Untuk Melakukan Penuntutan Dilihat Dari Peran Korban Dalam Terjadinya Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Dibawah Umur (Studi Kasus Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-05/PEKAN/01/2019)".** salawat serta salam kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, yang membawa manusia dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang.

Penulis menyadari sepenuhnya, tanpa bantuan dan partisipasi dari semua pihak, baik moril maupun material, penulisan skripsi ini tidak mungkin dapat diselesaikan dengan baik. Karena itu, sudah sepatutnyalah penulis sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak. Ucapan terima kasih, pertama-tama disampaikan kepada:

1. Ayahanda O.Sitompul, dan Ibunda R.Br. Silitonga, dan terima kasih juga kepada saudara kandung penulis abanghanda Candra Putra Roni Tua Sitompul, Rudi Wanto Sitompul, S.E., Franklyn Gunawan Sitompul, S.E. serta adekhanda Josua Yerika Sahputra Sitompul dan Johannes Sitompul yang telah banyak memberikan dukungan dan semangat kepada penulis. Dan juga kepada kakak ipar dan keponakan penulis.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., MCL., sebagai Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Riau
3. Bapak Dr. Admiral, S.H.,M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah banyak membantu penulis dalam menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau
4. Ibu Heni Susanti, S.H.,M.H, selaku pembimbing I dalam penulisan skripsi ini, yang telah banyak meluangkan waktu dengan segala ketulusan dan kearifan telah berkenan mengoreksi, mengarahkan dan membimbing dalam penulisan skripsi ini
5. Bapak Robi Herianto, SH., MH, selaku Kasi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Pekanbaru dan Bapak Didik Haryadi, SH, selaku Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Pekanbaru yang telah banyak meluangkan waktu dengan segala ketulusan memberikan arahan pada penulis dalam penulisan skripsi ini
6. Kepada sahabat-sahabat penulis, Hendra Zebua, SH., David Varada Simamora, Juli Sarwani Br. Nainggolan, Sari Novita, Edwin Hendrianto Pakpahan, Oky Hoklan Harianja yang selalu memberikan dukungan kepada penulis.
7. Teman-teman seperjuangan angkatan 2015 yang sama-sama berjuang dan saling memberikan dukungan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Penulis menyadari, penulisan skripsi ini masih ada kekurangan baik dari penulisan maupun kata-kata yang penulis gunakan. Oleh karena itu kritik dan saran sangat diharapkan guna kesempurnaan penulisan ini. Akhirnya kepada pihak-pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungannya yang tidak dapat disebutkan satu-persatu disini, penulis ucapkan terima kasih. Semoga budi baik dan bantuannya dibalas oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan nilai pahala. Amin…

Pekanbaru, 27 Februari 2020

Penulis

Desika Ria Raun Empiyana

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ……i

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT ……..ii

SERIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN ……..iii

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI ……...iv

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI ……...v

BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF ……...vi

SK PENUNJUKAN PEMBIMBING I ……..vii

SK PENUNJUKAN DOSEN PENGUJI KOMPREHENSIF ……...viii

ABSTRAK ……ix

ABSTRACT ……x

KATA PENGANTAR ……..xi

DAFTAR ISI ……..…xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah……1

B. Masalah Pokok……...5

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian ……6

D. Tinjauan Pustaka……7

E. Konsep Operasional……20

F. Metode Penelitian……..……..22

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB II TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Tentang Jaksa dan Penuntut Umum……....25

B. Tinjauan Tentang Korban dan Pelaku Kejahatan ……...32

C. Tinjauan Tentang Tipe-tipe Korban……54

D. Tinjauan Tentang Pembuktian ……..…….58

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Proses Pembuktian Oleh Jaksa Penuntut Umum untuk Melakukan Penuntutan Dilihat dari Peran Korban dalam Terjadinya Tindak Pidana Persetubuhan Tderhadap Anak Dibawah Umur (Studi Kasus Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-05/PEKAN/01/2019) ……..65

B. Hambatan dalam Proses Pembuktian Oleh Jaksa Penuntut Umum untuk Melakukan Penuntutan Dilihat dari Peran Korban dalam Terjadinya Tindak Pidana Persetubuhan Tderhadap Anak Dibawah Umur (Studi Kasus Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-05/PEKAN/01/2019) …….77

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan……..82

B. Saran……83

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konsep Indonesia menjadi Negara hukum termuat pada UUD 1945 yang member jaminan tegas tentang perlunya perlindungan HAM yang terdapat pada pasal 27 berbunyi*"bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya".* Prinsip yang serupa juga terdapat pasal 28D ayat (1) yang berisi tentang*"setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakukan yang sama dihadapan hukum".*

Tujuan Negara dalam melaksanakan asas persamaan dihadapan hukum dapat berjalan dengan baik dikarenakan adanya peran dan fungsi dari bantuan hukum yang mana adanya jaminan dan perlindungan yang diberikan sebagai bantuan hukum demi menjamin terlindungnya hak-hak setiap orang dari tindakan hukum diskriminatif.Persamaan dihadapan hukum harus diartikan secara dinamis dan tidak statis.Artinya, persamaan dihadapan hukum harus diimbangi dengan persamaan perlakuan. (suparta, 2014, pp. hal.181-192)

Adanya jaminan dan perlindungan hukum dari tindakan yang diskriminatif berfungsi untuk melindungi hak asasi manusia dalam menciptakan supremasi hukum yang baik yakni "upaya atau kiat untuk menegakkan dan memposisikan hukum pada tempat yang tertinggi dari segala-galanya, menjadikan hukum

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

sebagai komandan atau panglima untuk melindungi dan mengatur seluruh warga Negara tanpa memandang status dan kedudukannya".(manan, 2005, p. 196)

Lembaga Kejaksaan adalah lembaga hukum yang menjalankan kewenangan Negara secara merdeka terutama dalam pelaksanaan dibidang penyidikan maupun penuntutan dalam suatu perkara yang melanggar HAM (Hak Asasi Manusia) serta kewenangan lainnya yang diatur didalam undang - undang.Undang-undang Kejaksaan Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia dilihat lebih mampu menetapkan posisi dan peran Kejaksaan RI sebagai lembaga Negara pemerintahan untuk melakukan tugas Negara dibidang penuntutan, yang mana tujuan dari penuntutan tersebut untuk mencari dan mendapatkan atau setidak-tidaknya kebenaran materil. Fungsi lembaga Kejaksaan merupakan pengendali dalam sebuah proses perkara *(dominus litis)* yang memiliki peran penting untuk menegakkan hukum karena hanya lembaga kejaksaan yang berdasarkan alat bukti yang sah dalam acara pidana yang dapat menetapkan suatu kasus tersebut apakah dapat diproses dalam sebuah peradilan pidana, disisi lain lembaga kejaksaan berperan sebagai penyandang *(dominus litis)* dalam pelaksanaan putusan pidana *(executive ambtenaar)*.

*Djoko Prakoso*memberikan pengertian mengenai penuntutan pada proses pidana yakni "Dalam penegakan keadilan dan kebenaran, Jaksa dalam menuntut seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana akan mempertimbangkan segala perbuatan terdakwa yang telah dilakukan, sehingga tuntutan itu dirasakan adil oleh terdakwa maupun masyarakat. Dengan demikian seorang jaksa dapat

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

menciptakan dan mewujudkan kebenaran materil yang diharapkan dan dicita-citakan oleh seluruh masyarakat". (prakoso, 1987)

Pasal 137 KUHAP menjelaskan"Penuntut Umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu delik dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke Pengadilan yang berwenang mengadili".(hamzah & gultom, 2016)Salah satunya seperti menuntut suatu pemerkosaan terhadap anak dibawah umurdengancara kekerasan atau ancaman kekerasan yang berkaitan dalam tindakanasusila dimana pelaku biasanya orang dewasa yang dapat dipidanakan dengan melanggar Undang - undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.Pemerkosaan terhadap anak bukan sajadilakukan oleh orang yang tidak dikenal, akan tetapi terdapat beberapa kasus pemerkosaan terhadap anak dibawah umur yang dilakukan oleh orang-orang terdekat.

Terjadinya sebuah tindak pidana bukan sepenuhnya disebabkan oleh pelaku yang bersalah, namun disisi lain korban bisa saja menjadi pemicu dalam terjadinya sebuah tindak pidana, contohnya perbuatan asusila yang marak terjadi di Kota Pekanbaru yang mana kasus ini terjadidiantara mereka yang memiliki status berpacaran. Dalam status pacaran yang berlebihan biasanya akan adanya paksaan fisik maupun ancaman dalam melakukan sebuah hubungan seksual dengan alasan adanya rasa suka sama suka. Adanya peran dalam kedudukan korban dalam terjadinya sebuah perbuatan pidana Jaksa memiliki kewenangan dalam memberikan pertimbangan untuk melakukan sebuah penuntutan terhadap pelaku kejahatan, sehingga bisa diketahui dalam kejadian itu korban mempunyai

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

kedudukan sebagai pemicu demi terlaksananya perbuatan asusila.Artinya korban sendiri yang membuat dirinya sebagai korban dalam perbuatan tersebut.Sehingga dalam hal ini sebenarnya tujuan hukum itu mulia yang dibuat agar memberi pelayanan untuk masyarakat demi terwujudnya ketertiban, keamanan, keadilan dan kesejahteraan, tetapi nyatanya masih terjadi penyimpangan – penyimpangan baik dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja. Penyimpangan – penyimpangan tersebut harus ditindaklanjuti secara tegas sesuai dengan aturan hukum yang berlaku yaitu didalam Kitab Hukum Acara Pidana yang tertulis di undang – undang Nomor 8 Tahun 1981.

Pembuktian memegang peranan yang sangat penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan, karena dengan pembuktian inilah nasib terdakwa ditentukan dan hanya dengan pembuktian suatu perbuatan pidana dapat dijatuhi hukuman pidana. Berkaitan dengan alat bukti berupa keterangan saksi, surat dan petunjuk secara umum dikenal oleh pihak yang bersangkutan dari semua tingketan pemeriksaan sehingga tidak banyak menghasilkan permasalahan didalam penerapannya pada saat dipersidangan. Tetapi lain lagi dengan alat bukti yang berupa keterangan terdakwa dimana kadang kala sering menghasilkan permasalahan. Didalam sebuah persidangan sering ditemui suatu perkara dimana saksi yang melihat kejadian tersebut tidak ada dan hanya mendengarkan kejadian tersebut dari keterangan korban yang mengalami kejadian tersebut.Sehingga hal ini dapat mempersulit dalam memberikan pembuktian yang diperbuat oleh terdakwa.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Dalam karya tulis yang berjudul *Victimologi dalam sistem peradilan pidana,*Siswanto Sunarso menyatakan "pihak korban memainkan beberapa peran yang penting dalam kejahatan antara lain sebagai yang merangsang, mengundang dan yang membujuk pihak pelaku melakukan suatu kejahatan. Pihak korban dapat pula berperan sebagai korban semu yang bekerja sama dengan pihak pelaku dalam melaksanakan suatu kejahatan".(sunarso, 2012, p. hlm. 42)

Mengingat kedudukan korban dalam sebuah perbuatan pidana, Jaksa Penuntut Umum dapat mempertimbangkan status korban dan pelaku hingga Jaksa Penuntut Umum tidak keliru dalam memberikan penuntutan sebagai bahan pertimbangan terhadap pelaku pidana.Hal ini yang akandipertimbangkan oleh penuntut umum untuk melaksanakan penuntutan kepada terdakwa. Dengan melihat peran dan posisi korban perbuatan pidanaakan memberikan tuntutan lebih adil bagi korban tanpa melanggar peraturan perundang-undangan atau nilai-nilai yang terkandung dimasyarakat demi menjamin kehidupan terdakwa maupun pihak korban dan masyarakat menjadi lebih baik, aman, tentram dan sejahterah.

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis tertarik melakukan penelitian ini dengan judul**"Proses Pembuktian Oleh Jaksa Penuntut Umum Untuk Melakukan Penuntutan Dilihat Dari Peran Korban Dalam Terjadinya Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Dibawah Umur (Studi Kasus Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-05/PEKAN/01/2019)".**

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

B. Masalah Pokok

Berdasarkan alasan penelitian sebagaimana di jelaskan pada latar belakang diatas, rumusan masalah di dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana proses pembuktian oleh Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan penuntutan dilihat dari peran korban dalam terjadinya tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur (studi kasus tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-05/PEKAN/01/2019)?
2. Apa saja yang menjadi hambatandalam proses pembuktian oleh Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan penuntutan dilihat dari peran korban dalam terjadinya tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur (studi kasus tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-05/PEKAN/01/2019)?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui proses pembuktian oleh Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan penuntutan dilihat dari peran korban dalam terjadinya tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur (studi kasus tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-05/PEKAN/01/2019).

b. Untuk mengetahui hambatan - hambatan dalam proses pembuktian oleh Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan dilihat dari peran korban dalam terjadinya tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

umur (studi kasus tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-05/PEKAN/01/2019)

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini yaitu :

a. Untuk penulis,semoga penelitian ini bisa memberikan pemahaman pengetahuan bagi penulis mengenai hukum pidana, khususnya mengenai proses pembuktian oleh Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan penuntutan yang diberikan Penuntut Umum bagi pelaku dilihat dari peran korban dalam terjadinya perbuatan pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur
b. Semoga penelitian ini bermanfaat bagikawan-kawan mahasiswa dan peneliti yang lainnya untuk melakukan penelitian dibidang yang serupa.

D. Tinjauan Pustaka

1. Pembuktian

a. Pengertian Pembuktian

Pembuktian yaitu pemegang peranan sangat penting didalam pemeriksaan dipersidangan dan merupakan yang paling utama agar bisa memastikan bisa atau tidaknya terdakwa dijatuhi hukuman pidana.Oleh sebab itu agar bisa dijatuhi hukuman seorang terdakwa wajib mengupayakan pembuktiannya mengenai apa yang didakwakan sesuai dengan dakwaan yang diberikan penuntut umum. Dari proses pembuktian inilah akan menentukan bagaimana nasib seorang narapidana.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Jika hasil pembuktian dari alat – alat bukti yang telah diatur oleh undang – undang tidak memenuhi untuk membuktikan suatu kesalahan yang telah didakwakan pada terdakwa, maka terdakwa harus dibebaskan dari hukumannya diatur pada pasal 191 ayat (1) KUHAP menyatakan "jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di siding kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa di putus bebas".

Pembuktian yaitu sebuah langkah untuk mengetahui bagaimana alat – alat bukti yang sah dalam suatu aturan hukum acara yang telah berlaku dapat digunakan maupun dipertahankan agar memberikan petunjuk yang jelas dalam suatu perkara. (Waluyo B. , 1991, p. 3)

Darwin Prinst (1998 : 133) mengatakan mengenai makna dari pembuktian yaitu "pembuktian bahwa benar suatu tindak pidana telah terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukan sehingga harus mempertanggungjawabkannya. Untuk membuktikan kesalahan terdakwa, pengadilan terikat oleh cara – cara atau ketentuan – ketentuan pembuktian sebagaimana telah diatur dalam undang – undang pembuktian yang sah harus dilakukan di siding pengadilan yang memeriksa terdakwa".

Dilihat dari sudut pandang hukum acara pidana mengenai pembuktian yaitu aturan yang membatasi siding pengadilan untuk mencari dan mempertahankan kebenaran baik menurut hakim, penuntut umum, terdakwa atau penasehat hukum yang berkatian dengan ketentuan tata cara pada penilaian alat bukti yang diatur dalam undang - undang. Tidak boleh leluasa

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

bertindak dengan caranya sendiri dalam menilai pembuktian.Dalam mempergunakan alat bukti tidak boleh bertentangan dengan undang – undang.Terdakwa tidak bisa leluasa mempertahankan sesuatu yang dianggapnya benar diluar ketentuan yang telah digariskan undang – undang.

Hukum pembuktian yaitu aturan kaidah hukum mengenai pembuktian dari semua proses yang memakai alat bukti sah dengan tindakan yang sesuai dengan prosedur secara khusus untuk membuktikan fakta – fakta yang terungkap pada saat dipersidangan.

Ada beberapa alat – alat ukur dalam melakukan pekerjaan pembuktian diantaranya :

1) *Bewijsgronden*, merupakan dasar atau prinsip mengenai kesimpulan pembuktian dalam pertimbangan yang diberikan oleh pengadilan.
2) *Bewijsmiddelen*, merupakan alat yang bisa dipergunakan oleh seorang hakim demi mendapatkan keterangan mengenai kejadian tindakan jahat yang telah lama.
3) *Bewijsvoering*, merupakanpenjabaran untuk mengetahui cara memberikan alat bukti pada hakim disidang pengadilan yang berlangsung.
4) *Bewijskracht*, merupakan kemampuan pembuktian pada ikatan penilaian demi terbuktinya sebuah dakwaan pada masing – masing alat bukti tersebut.
5) *Bewijsfast*, merupakan tanggungjawab pada pembuktian terhadap peraturan perundangan agar memberikan bukti yang benar mengenai dakwaan di muka pengadilan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

b. Sistem atau Teori Pembuktian

Ada bebarapa bentuk teori pembuktian yang dikenal dalam hukum acara pidana yang jadi dasar bagi hakim didalam melaksanakan penyelidikan pada terdakwa pada saat siding dipengadilan.Ada empat bentuk teori pembuktian dalam perkembangannya pada praktek peradilan pidana.Setiap teori itu mempunyai karakter yang berbeda dan hal itu jadi cirri dari setiap teori itu :

1) Sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang – undang secara positif D.simon berpendapat bahwa sistem teori tersebut mengusahakan untuk menyingkirkan segala pertimbangan subjektif terhadap hakim serta mengikat hakim dengan ketat sesuai dengan aturan – aturan dalam pembuktian yang tegas.

   Teori ini sudah tidak ada yang menganut lagi, sebab sudah sangat banyak menggunakan pembuktian berdasarkan kekuatan yang berupa undang - undangg.Teori ini telah ditolak untuk dianut di Indonesi oleh Wirjono Prodjodikoro, karena bagaimana bisa hakim memberikan kebenaran selain dengan menyatakan kepada keyakinannya tentang kebenaran itu sendiri.Lagipula keyakinan hakim yang dianggap lebih jujur dan lebih pengalaman dianggap telah sesuai dengan keyakinan masyarakat itu sendiri.

2) Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim melulu.

   Wirjono Prodjodikoro menyatakan dalam teori pembuktian ini sudah dikembangkan di Indonesia di pengadilan distrik dan pengadilan kabupaten.Teori tersebut dinyatakan memungkinkan hakim dapat

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

memberikan apa yang jadi landasan kepercayaannya, seperti keterangan medium atau dukun.

Teori tersebut dapat memberikan keluasan bagi hakim, hingga sangat sulit diawasi.Disamping itu juga sangat sulit untuk melakukan pembelaan bagi terdakwa maupun penasehat hukumnya.Sehingga hakim bisa menjatuhkan pidana terhadap terdakwa atas dasar keyakinannya sendiri bahwa terdakwa tersebut telah terbukti bersalah sesuai dengan dakwaan yang telah didakwakan kepadanya.

3) Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis.

Dalam sistem ini pembuktian dikatakan juga dengan pembuktian bebas karena seorang hakim bebas untuk memberikan alasan – alasan keyakinannya sendiri. Sistem teori pembuktian ini merupakan jalan tengah atau berdasarkan keyakinan seorang hakim sampai batas yang tertentu, yang pertama yaitu pembuktian berdasarkan kepercayaan hakim pada pertimbangan yang pasti dan yang kedua ialah teori pembuktian berdasarkan undang – undang secara negative yang mana persamaan antara keduanya ialah keduanya sama berdasarkan atas kayakinan hakim artinya terdakwa tidak mungkin dipidana tanpa adanya keyakinan hakim bahwa ia bersalah.

Perbedaannya ialah bahwa yeng pertama berpangkal tolak pada keyakinan hakim tetapi keyakinan itu harus didasarkan kepada suatu kesimpulan yang logis yang tidak didasarkan kepada undang – undang tetapi ketentuan – ketentuan menurut ilmu pengetahuan hakim sendiri,

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

menurut pilihannya sendiri tentang pelaksanaan pembuktian yang mana yang ia akan pergunakan. Sedangkan yang kedua berpangkal tolak pada aturan – aturan pembuktian yang ditetapkan secara limitative oleh undang – undang dan harus mengikuti keyakinan hakim.

4) Teori pembuktian berdasarkan undang – undang secara negative.

Pasal 341 ayat (4) Undang – undang Kekuasaan Kehakiman menyatakan "bahwa kesalahan terdakwa tidak dapat dianggap terbukti atas pengakuan salah terdakwa saja, melainkan harus ditambah dengan alat – alat bukti yang lain". Pasal 342 ayat (2) mengungkapkan "bahwa keterangan seorang saksi saja tidaklah cukup untuk menganggap kesalahan terdakwa telah terbukti, ini disebut bukti minimum".

Didalam suatu sistem mengenai teori pembuktianmenyebutkan pemidanaan berdasarkan pada pembuktian berganda yang artinya harus berdasarkan aturan perundangan serta kepercayaan hakim, dimana berdasrkanperundang – undangan dasar dari kepercayaan hakim berdasarkan dari aturan perundangan yang berlaku.(Prodjodikoro, 1967, pp. 72-77)

2. Jaksa dan Penuntut Umum.

a. Pengertian Jaksa dan Penuntut Umum.

Didalam UU Nomor 16 Tahun 2004 Pasal 1 butir 1 dijelaskan "Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai Penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

telah memperolehkekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang".

Pada buku yang berjudul *mengenai Pidana dan Pemidanaan*, Bambang Waluyo menjelaskan "Jaksa adalah pejabat fungsional yang diangkat dan diberhentikan oleh Jaksa Agung. Dalam melakukan tugas penuntutan, Jaksa bertindak untuk dan atas nama negara, dengan keyakinan berdasarkan alat bukti yang sah serta demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, Jaksa senantiasa bertindak berdasarkan hukum dan mengindahkan norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat".

Pasal 1 butir 6bKUHAP menyatakan "Penuntut umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim".Pasal 1 butir 1 dan 2 Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 menjelaskan "Jaksa memiliki kewenangan sebagai Penuntut Umum dan sebagai eksekutor, sementara kewenangan Penuntut Umum yaitu melakukan penuntutan serta melaksanakan penetapan hakim".

KUHAP pasal 1 butir 7 mengartikan "penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim disidang pengadilan".

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

M. Sutadi, S.H. (mantan Jaksa Agung Muda Pembinaan)mengatakan "Kejaksaan/Jaksa akan dihargai jikamampu dan berhasil melaksanakan tugasnya sebagai penuntut umum bila argumentasi dalam menyampaikan tinggi rendahnya tuntutan pidana dapat diterima masyarakat sesuai dengan kepatutan dan kewajaran".

Berdasarkan hal demikian, Jaksa Agung telah menerbitkan surat edaran nomor:SE-013/A/JA/12/2012 Tentang Pedoman Tuntutan Pidana. Tujuan pedoman tersebut diantaranya :

a) Menciptakan suatu tuntutan pidana yang memiliki keadilan bagi setiap orang.
b) Menciptakan tuntutan pidana yang mampu memberikan efek jera terhadap setiap orang yang melakukan perbuatan pidana.
c) Menciptakan suatu kesepakatan dalam proses penuntutan sesuai dengan dasar-dasar yang ada dalam lembaga kejaksaan.

b. Tugas dan Kewenangan Jaksa Penuntut Umum

Jaksa Penuntut Umum memilik kekuasaan terdapat pada Pasal 14 KUHAP yaitu "menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik tertentu, mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik, memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan atau mengubah status tahanan setelah perkara tersebut dilimpahkan oleh penyidik, membuat surat dakwaan serta melimpahkan perkara ke Pengadilan, melakukan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

penuntutan dan melaksanakan penetapan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap".(kansil, 1986, p. hlm. 357)

Di Indonesia azas penuntutan yang terdapat dalam KUHAP terdiri atas dua macam diantaranya :

a) Asas Legalitasadalah dalam hal memberikan tuntutan terhadap pelaku kejahatan,Penuntut Umum harusberpedoman pada Undang-undang yang mana perbuatannya telah memenuhi unsure-unsur dalam suatu perbuatan pidana.
b) Asas Oportunitas yaitu Penuntut Umum tidak harus menuntut pelaku meski pelaku telah terbukti melakukan perbuatan pidana yang bisa dihukum.

Dari kedua asas diatas dalam praktek yang paling sering digunakan yaitu Asas Opurtunitas yang mana Jaksa merupakan Penuntut Umum memilikipenguasaan untuk mengenyampingkan perkara yang telahterbukti dilakukan demi tercapainya maksud asas tersebut untuk kepentingan umum.

3. Korban dan Pelaku Kejahatan

a. Korban

1) Pengertian Korban

Dalam Resolusi Majelis Umum PBB 40/34 tanggal 29 November 1985 tentang *"Declaration of basic principles of justice for victim and abuse of power"* menyebutkan yang diartikan dengan "korban ialah orang-orang, baik secara individual maupun kolektif yang menderita kerugian akibat tindakan yang melanggar aturan yang berlaku disuatu Negara". Menurut *victim of abuse*

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

of power“korban termasuk juga orang-orang yang menjadi korban dari perbuatan-perbuatan yang walaupun belum merupakan pelanggaran menurut norma-norma HAM yang diakui secara internasional”.

Suatu tindakan kejahatan mesti melibatkan dua pihak, yaitu sipelaku kejahatan dan sikorban pada beberapa kasus kejahatan seperti narkotika dan bunuh diri.

Sebuah proses peradilan pidana berawal dari sikap korban yang melaporkan atau tidak melaporkan suatu perbuatan pidana yang dialaminya yang mana perbuatan pidana tersebut tergantung dari sikap sikorban. Persepsi si korban terhadap suatu perbuatan pidana dapat dijadikan sebagai kejahatan, sebagai contoh perkara persetubuhan, baru dapat di proses di Pengadilan jika korban melaporkan perkara tersebut.

Pendapat korban mengenai perkara pemerkosa. Apabila si korban merasakan bahwa pemerkosaan itu mendatangkan suatu kerugian bagi dia, besar kemungkinan dia akan melaporkan kasus pemerkosaan tersebut. Jadi ternyata bahwa awal dari suatu proses peradilan terletak di tangan si korban.(zulkarnain, 2011)

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban berbunyi “korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.Pada buku Mahrus Ali mengenai Dasar-Dasar Hukum Pidana, Arif Gosita berpendapat(ali, 2012, p. hlm. 57) “korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

orang lain yang bertentangan dengan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang mencari pemenuhan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi yang menderita".

Bermacam arti korban banyak diungkapkan oleh para ahli hingga bersumber dari konvensi-konvensi Internasional yang berkenaan dengan masalah korban perbuatan pidana diantaranya :

a) Korban*(victims)*merupakan orang yang secara individual ataupun kolektif sudah menderita kerugian fisik maupun mental, emosional, ekonomi atau gangguan substansial pada hak-hak fundamentalnya yang melalui perbuatan pidan tersebut dapat melanggar hukum pidana disetiap Negara termasuk penyalahgunaan penguasaan. (muladi, 2002, p. hlm. 108)
b) Undang-undang Nomor 27 tahun 2004 tentang komisi kebenaran dan rekonsiliasi "korban adalah orang perorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan, baik fisik, mental maupun emosional, kerugian ekonomi atau mengalami pengabaian, pengurangan atau perampasan hak-hak dasarnya sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat termasuk korban adalah ahli warisnya".
c) Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2002 tentang Tata cara perlindungan terhadap korban dan saksi dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat, "korban adalah orang perorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror dan kekerasan pihak manapun".

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2) Tipologi Korban

Kemajuan ilmu viktimologi dapat membuat masyarakat lebih memfokuskan kedudukan korban hingga timbul bermacam bentuk korbandiantaranya :

a) *Nonparticipating victims,*adalah orang yang enggak memperdulikan untuk mengupayakan dalam penanggulangan suatu kejahatan.
b) *Laten victims,*adalah orang yng memiliki cirri khas tertentu hingga sering jadi korban.
c) *Procative victims,*adalah orang yang membuat rangsangan hingga terjadi sebuah kejahatan.
d) *Participating victims,*yaitu orang dengan tingkah lakunya membuat diri sendiri jadi korban.
e) *False victims,*adalah orang akibat perilakuknya membuat ia jadi korban.

Macam – macam korban diidentifikasi berdasar situasi maupun status korban memiliki kesamaan dengan macam – macam korban yang disebutkan diatas,diantaranya :

a) *Unrelated victims,*adalah korban yang bukanmempunyai ikatan dengan pelaku.
b) *Provocative victims,*adalah orang yang membuat sendiri dirinya jadi korban. Seperti kasus persetubuhan terhadap anak belum cukup umur dimana korban dan tersangka berstatus pacaran.
c) *Participating victims,*adalah orang dengan perilakunya membuat dirinya jadi korban perbuatan yang tidak dilakukannya.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

d) *Biologically weak victims,*merupakan orang yang fisiknya lemah hingga membuatnya jadi korban.

e) *Socially weak victims,*yaitu orang yang nilai sosialnya lemah mengakibatkan dirinya jadi korban.

f) *Self victimizing victims,*adalah orang karena kejahatannya sendiri jadi korban. seperti korban obat bius, aborsi, prostitusi.

Stephen Schafer mengungkapkan ada empat tipe korban berdasarkan prinsipnya diantaranya :

a) Mereka yang tidak mempunyai kesalahan apapun, tapi tetap jadi korban.

b) Korban yang secara tidak sadar maupun sadar melakukan sesuatu yang dapat merangsang orang sekitarnya atau orang lain berbuat jahat.

c) Mereka yang menjadi korban secara biologis dan potensial.

d) Korban karena ia sendiri merupakan pelaku.

b. Pelaku Kejahatan.

Kejahatan *(crime)* memiliki maksud yang bermacam hingga tidak ada pengertian baku mana didalamnya terdapat semua aspek kejahatan. Dari aspek sosiologis, yuridis maupun kriminologis dapat dilihat pengertian sebuah kejahatan.Hadirnya pembedaan pengertian kejahatan tersebut karena pandangan setiap orang yang berbeda-beda.

Kejahatan adalah terjadinya masalah sosial yang paling tua dalam peradaban manusia, sudah 80 kali konferensi internasional membicarakan masalah penanggulangan kejahatan dimulai dari tahun 1825 sampai tahun 1970 membahas upaya penanggulangan persoalan kejahatan sebagaimana ditulis

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

oleh Graham Huges (1983:294-295) terdapat dua konsep tentang kejahatan yang saling berkaitan, yang *pertama* ide tentang kejahatan yang dapat disebut juga dengan *Natural* dan keberadaannya dipahami secara intusi oleh kebanyakan orang bahwa suatu perbuatan dipandang jahat, karena masyarakat memang mencelanya, seperti perbuatan kumpul kebo dalam masyarakat yang dilarang dan malah akan menimbulkan celaka yang besar dari pencipta alam semesta. Kedua adalah kejahatan-kejahatan yang telah ditetapkan oleh undang-undang atau hukum positif.Namun demikian sampai dewasa ini kriminologi belum mampu memberikan definisi tentang kejahatan.(yudikrismen, 2009)

Secara etimologis kejahatan merupakan wujud perilaku yang berlawanan terhadap nilai moral yang bertentangan dan banyak dibenci oleh masyarakat.

Van Bemmelen mengemukakan perbuatan jahatyaitu perilaku dapat menimbulkan rugi yang mengakibatkan ketidaktentraman dalam hidup orang-orang hingga orang-orang tersebut bisa mengucilkannya dan melakukan penolakan akan perbuatan orang lain dalam wujud pemidanaan secara sengaja diserahkan akibat perilakunya tersebut.

F. Konsep Operasional.

Konsep operasional tersebut berisibatasan-batasan mengenai terminology yang ada pada judul dan ruang lingkup penelitian.Pada judul penelitian ini penulis membuat batasan-batasan istilah dituju untuk menghindarkan penafsiran dan pemahaman yang keliru pada penelitian tersebut hingga bisa menuju pada batasan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

yang difokuskan dalam permasalahan agar tidak ada pemahaman yang kabur akibat ruang lingkup yang sangat luas. Batasan-batasan tersebut diantaranya:

1. Pembuktian, menurut hukum pada dasarnya pembuktian adalah cara menentukan pokok atau hakikat dari adanya kenyataan didapat lewat ukuran yang pantas pada pemahaman yang masuk akal atas kenyataan dimasa dahulu yang belum terang jadi kenyataan yang sangat terang pada ikatan dengan suatu tindakan pidana.(Muhammad R. , 2007, p. 185)
2. Jaksa dan penuntut umum, pasal 1 butir 6 KUHAP disebutkan"Jaksa yaitu pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap".Sedangkan Penuntut Umum yaitu "Jaksa diberikan kewenangan perundanganagar melaksanakan penuntutan dan penetapan hakim.(Muhammad, 2007, p. 10)
3. Penuntutan, dalam pasal 1 butir 7 KUHAP disebutkan"tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan".(Muhammad D. H., 2007, p. 76)
4. Korban *(victims)*merupakan orang – orang yang telah mengalami kerugian secara pribadi maupun bersama - sama, seperti kerugian jasmani, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial bagi hak setiap orang yang mendasar yang telah melanggar aturan hukum pidananya dimasing – masing Negara melalui perbuatan atau komisi. (muladi, 2002, p. hlm. 108)

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

5. Tindak Pidana, menurut pendapat Wirjono Prodjodikoro “tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana, karena hukum merupakan rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota masyarakat, sedangkan satu-satunya tujuan dari hukum ialah mengadakan keselamatan, kebahagiaan dan tata tertib dalam masyarakat”. (prodjodikoro, 2002, p. hlm. 14)
6. Persetubuhanadalah peraduan antara kemaluan laki-laki dan perempuan yang bisa dijadikan untuk mendapatkan anak. Anggota kelamin laki-laki harus masuk kedalam anggota kelamin perempuan, sehingga mengeluarkan air mani. (R.Soesusilo, 1995, p. hlm.209)
7. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan *(pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak).*

G. Metode Penelitian.

Supaya permasalahan dalam penelitian ini bisa diselesaikan, maka wajib menggunakan metode penelitian yang mana penulis memakai metode penelitian diantaranya :

1. Jenis dan sifat penelitian.

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini menggunakan metode hukum observasi atau survei karena penulis melakukan observasi secara langsung pada pihak yang berkaitan mengenai permasalahan pokok tersebut agar mendapatkan informasi

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

yang lebih akurat.Sehubungan dengan hal tersebut, jenis penelitian ini yaitu deskriptif analitis.

2. Lokasi penelitian.

Sehubungan dengan jenis dan sifat penelitian tersebut, maka memakai metode observasi atau survei, maka penulis mengadakan penelitian yang berlokasi di kantor Kejaksaan Negeri Pekanbaru.

3. Populasi atau sampel.

Populasi yaitu semua objek atau individu maupun kejadian yang diteliti (R.H, 1989).Responden yaitu orang – orang yang dijadikan sampel didalam suatu penelitian.Responden dalam penelitian ini yaitu Jaksa Penuntut Umum yang menangani perkara tersebut untuk melakukan penuntutan, Kasi Tindak Pidana Umum dan Terdakwa.

4. Data dan Sumber Data.

a. Data primer, yaitu ditemukan melalui responden dalam permasalahan ini adalah Jaksa Penuntut Umum yang menangani permasalahan tersebut dan tersangka sebagai pelaku dari perbuatan tersebut.
b. Data sekunder, yaitu didapatkan dari Kantor Kejaksaan Negeri Pekanbaru, buku-buku yang berhubungan dengan penelitian tersebut, dan pendapat para ahli yang dapat membantu terselesaikkannya penelitian ini.

5. Alat Pengumpul Data.

Berdasarkan data yang dibutuhkan yaitu mengenai permasalahan proses pembuktian oleh penuntut umum dalam melakukan penuntutan dilihat dari peran korban dalam terjadinya suatu perbuatan pidana, maka penelitian ini penulis

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

langsung mencari sumber informasi dengan melakukan wawancara yangsecara langsung kepada Jaksa Penuntut Umum yang berada pada Kantor Kejaksaan Negeri Pekanbaru yang bertugas menyelesaikan suatu perkara tersebut hingga memperoleh data yang lebih akurat dan pasti. Pencarian informasi mengenai data yang dibutuhkan penulis akan diberhentikan jika data tersebut dianggap sudah lengkap dan cukup.

6. Analisis Data.

Analisis data pada penelitian ini mengenai proses pembuktian oleh penuntut umum dalam melakukan penuntutan dilihat dari peran korban dalam terjadinya tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur memakai analisis data kualitatif yang mana data primer dan sekunder yang sudah disusun dengan sistematis selanjutnya dianalisiskan secara perspektif dengan memakai metode deduktif dan indukatif.

7. Metode Penarikan Kesimpulan.

Dalam hal ini metode kesimpulan yang dipakai yaitu metode induktif yang penarikan kesimpulan dari khusus ke yang umum dan memakai metode deduktif yaitu dari yang umum ke yang khusus.Sehingga dalam permasalahn ini metode penarikan kesimpulan yang penulis gunakan adalah metode penelitian deduktif.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Jaksa Dan Penuntut Umum

1. Pengartian Jaksa

Saherodji yang merupakan seorang cendikiawan kejaksaan memiliki pendapat pemikiran mengenai jaksa yaitu "kata jaksa berasal dari bahasa sansekerta yang berarti pengawas atau pengontrol yaitu pengawas soal-soal kemasyarakatan".Kemudian sesuai dengan lampiran Surat Keputusan Jaksa Agung RI No. Kep.074/J.A/1987 tanggal 17 Juli 1978 menyatakan bahwa "Jaksa asal kata dari seloka *satya adhy wicaksana*yang merupakan trapsila adhiyaksa yang menjadi landasan jiwa dan raihan cita-cita setiap warga adhyaksa dan mempunyai arti serta makna sebagai berikut :*satya,* kesetiaan yang bersumber pada rasa jujur, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap diri pribadi dan keluarga maupun sesame manusia. *Adhy,* kesempurnaan dalam bertugas dan yag berunsur utama pemilikan rasa tanggung jawab baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa terhadap keluarga serta terhadap sesame manusia. *Wicaksana,* bijaksana dalam tutur kata dan tingkah laku khususnya dalam penerapan kekuasaan dan kewenangannya".(Prakoso & Murtika, 1987, p. 17)

Didalam pasal 1 butir 6a KUHAP dijelaskan "Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

tetap".Jaksa merupakan seorang pejabat fungsional yang dapat diberhentikan maupun diangkat oleh Jaksa Agung.Jaksa dapat bertindak berdasarkan atas nama Negara memakai keyakinannya melalui alat bukti sah agar mewujudkan keadilan dan kebenaran dalam melakukan tugasnya sebagai seorang penuntut.

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyatakan "Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang - undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang – undang".

2. Pengertian Penuntut Umum

C.S.T. Kansil berpendapat "penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang – undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim". Sama hal nya pasal 1 butir 2 UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia bahwa "Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang - undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan ketetapan hakim".

3. Tugas dan Wewenang Jaksa dan Penuntut Umum

Wewenang merupakan hak dan kekuasaan yang dimiliki oleh setiap orang untuk melakukan sesuatu. Setiap apapun yang dikerjakan penuntut umum tidak akan memiliki dasar yang sangat kuat tanpa adanya wewenang, sehingga dalam hal ini seorang penuntut umum wajib diberikan wewenang untuk melaksanakan segala tindakan yang diberikan kepadanya.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Max Weber berpendapat wewenangyaitu sebuah hak yang telah ditentukan dalam sebuah tata tertib social demi menentukan kebijakan – kebijakan, keputusan tentang persoalan yang sangat penting demi menyelesaikan permasalahan yang ada.(Soekanto, 1987)

Di pasal 13 KUHAP telah mengatur mengenai kewajiban dan kekuasaan bagi penuntut umum, dan pada pasal 14 KUHAP diatur mengenai tugas – tugas yang wajib dilaksanakan oleh penuntut umum sementara didalam pasal 137 KUHAP mengatur mengenai wewenang penuntut umum.

Pada pasal 1 butir 6 huruf a KUHAP bahwa "Jaksa adalah sebagai pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap".

Pasal 30 UU Nomor 16 Tahun 2004 menyebutkan terdapat beberapa bidang dalam kewajiban dan kewenangan Kejaksaan diantaranya :

1) Dibidang pidana, memiliki kewajiban dan kewenangan berupa :
    a) Untuk melakukan penuntutan didalam persidangan perkara.
    b) Untuk melakukan segala penetapan dari hakim dan melaksanakan putusan dari pengadilan.
    c) Untuk melaksanakan pengawasan pada segala putusan pidana bersyarat, pengawasan maupun putusan lepas bersyarat.
    d) Untuk melaksanakan penyidikan pada suatu tindak pidana sesuai dengan aturan perundang – undangan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

e) Mengkoordinasikan kepada penyidik untuk memeriksa dan melengkapi berkas perkara yang kurang agar berkas perkara tersebut bisa dilimpahkan ke pengadilan guna pemprosesan lebih lanjut.

2) Dibidang datun,memilik kuasa secara khusus yang bisa melakukan tindakan didalam maupun diluar pengadilan.

3) Dibidang ketertiban dan ketentraman umum, ikut serta mengadakan segala kegiatan diantaranya :

   a) Meningkatkan kesadasaran masyarakat terhadap hukum.

   b) Melakukan penjagaan terhadap peraturan dari penegak hukum.

   c) Mengontrol aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan Negara.

   d) Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama.

   e) Penelitian dan pengembangan hukum serta statistic criminal.

4) Tugas lainnya, diantarnya menempatkan terdakwa di rumah sakit, member pertimbangan hukum pada instansi – instansi, pembinaan hubungan sesame aparat penegak hukum.(Anwar & Adang, 2009, pp. 196-200)

Penuntut umum memiliki kekuasaan secara normative yang dirumuskan KUHAP pasal 14 “menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu, mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan namun dengan memperhatikan ketentuan pasal 10 ayat (3) dan ayat (4) dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik, memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

perkaranya dilimpahkan oleh penyidik, membuat surat dakwaan, melimpahkan perkara ke pengadilan, menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan baik kepada terdakwa maupun kepada saksi untuk datang pada siding yang telah ditentukan, melakukan penuntutan, menutup perkara demi kepentingan hukum, mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang – undang ini, melaksanakan penetapan hakim".

4. Penyelidikan dan Penyidikan

Penyelidikan merupakan rangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa ynag diduga sebagai tindak pidana guna menentukan bisa atau tidaknya tindakannya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur menurut undang – undang tersebut. Penyelidikan bukanlah merupakan fungsi yang berdiri sendiri, terpisah dari fungsi penyidikan, melainkan hanya merupakan salah satu metode dari fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain yaitu berupa tindakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, penyelesaian dan penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum.

Fungsi dari penyidikan diantaranya :

a. Adanya perlindungan dan jaminan terhadap hak asasi manusia
b. Adanya persyaratan dan pembatasan yang ketat dalam penggunaan upaya paksa
c. Ketatnya pengawasan dan adanya lembaga ganti rugi dan rehabilitasi

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Pada pasal 1 angka 3 KUHAP menjelaskan “yang melakukan penyelidikan adalah penyelidik” sementara pada pasal 1 angka 4 KUHAP menjelaskan “penyelidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang – undang untuk melakukan penyelidikan”. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut tidak ada instansi atau pejabat lain yang dapat melakukan penyelidikan kecuali oleh instansi atau pejjabat polri. Dengan demikian jaksa atau pejabat lainnya tidak diperkenankan melakukan penyelidikan kecuali dalam hal diatur dalam undang – undang khusus.

Kewenangan penyelidik diatur dalam pasal 5 KUHAP diantaranya : (Muhammad R. , Hukum Acara Pidana Kontemporer, 2007, pp. 52-57)

a) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana
b) Mencari keterangan dan barang bukti
c) Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri
d) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab

Penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang – undang ini untuk mencari serta menumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Penyidik pejabat yang melaksanakannya adalah penyelidik yag terdiri dari pejabat polri saja tanpa adanya pejabat lainnya yaitu pejabat polri dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Tujuan dalam melakukan penyidikan terdapat tindak pidana diharapkan dapat diperoleh keterangan – keterangan berupa :

a. Jenis dan kualifikasi tindak pidana yang terjadi, misalnya seperti tindak pidana pembunuhan (biasa, berencana) sehingga yang dilakukan adalah untuk mengetahui bentuk – bentuk tindak pidana apa yang sesungguhnya telah terjadi sehingga dapat menentukan pasal – pasal yang dilanggarnya.
b. Waktu tindak pidana dilakukan, penyidikan yang dilakukan harus dapat mengungkap waktu dilakukannya suatu kejahatan.
c. Tempat terjadinya tindak pidana, dimaksudkan tempat dimana si pelaku melakukan kejahatannya. Tempat dapat terjadi pada suatu lokasi tertentu atau dibeberapa lokasi.
d. Dengan apa tindak pidana dilakukan, dalam penyidikan hal yang penting diungkapkan adalah alat – alat yang digunakan pelaku didalam melakukan kejahatannya.
e. Alasan dilakukannya tindak pidana, keterangan yang perlu diungkapkan penyidik didalam melakukan penyidikan adalah alasan yang mendorong dilakukannya tindak pidana, maksudnya untuk mengetahui apa sesungguhnya yang menyebabkan pelaku melakukan kejahatan.
f. Pelaku tindak pidana, keterangan ini untuk menyimpulkan siapa sebenarnya tersangka yang melakukan tindak pidana dengan melihat antara keterangan – keterangan yang telah diperoleh melalui alat – alat bukti lainnya.

Didalam KUHAP dapat diketahui bahwa proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dapat digambarkan diantaranya :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

a) Diawali dengan adanya bahan masukan suatu tindak pidana, seperti adanya laporan, pengaduan, tertangkap tangan dan diketahui sendiri oleh aparat penegak hukum dari hasil penyelidikan.
b) Melakukan tindakan pertama ditempat kejadian.
c) Pemanggilan dan pemeriksaan tersangka dan saksi
d) Melakukan upaya paksa yang diperlukan
e) Pembuatan berita acara penyidikan
f) Penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum

Penyidik dapat menghentikan penyidikan jika ternyata perkara tersebut tidak dapat cukup bukti karena peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, sebagaimana dalam pasal 109 ayat (2) KUHAP. Ada konsekuensi yuridis atau akibat hukum tertentu jika penyidik melakukan penghentian penyidikan terhadap suatu perkara yang sedang ditanganinya. (Muhammad R. , Hukum Acara Pidana Kontemporer, 2007, pp. 58-67)

B. Tinjauan Umum Tentang Korban Dan Pelaku Kejahatan

1. Korban

a. Pengertian Korban

Sebuah tindak pidana pada lingkungan tidak hanya harus pada individu maupun orang perorangan, tapi dapat juga pada sekelompok orang maupun masyarakat ataupun terhadap badan hukum.Saat kejahatan yang tertentu korban bisa bersumber dari segala macam kehidupan yang lainnya.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Dilihat dari pengertian korban menurut beberapa ahli atau yang bersumber dari konvensi interrnasional mengenai korban tindak pidana yang menimpa dirinya, antara lain beberapa pengertian korban menurut para ahli diantarnya :

1) Arif Gosita, korban yaitu orang yang mengalami penderitaan baik secara jasmaniah maupun rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi yang menderita.
2) Bambang Waluyo dalam bukunya yang berjudul victimologi perlindungan korban dan saksi, bahwa yang dimaksud dengan korban adalah orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas pebuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya.
3) Van Boven juga mengartikan korban yaitu "Orang yang secara individual maupun kelompok telah menderita kerugian, termasuk cedera fisik maupun mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau perampasan yang nyata terhadap hak-hak dasarnya, baik karena tindakan *(by act)* maupun karena kelalaian *(by omission)".*

Bersumber dari beberapa definisidiatas dapat disumpulkan mengenai arti korban yaitu tidak semata – mata mengenai pada orang perorangan saja tetapi dapat mencakup semua kelompok maupun masyarakat luas.Sehingga pengertian tersebut juga mencakup mengenai derita yang dialami korban baik derita terhadap fisik atau mental, kerugian ekonomi tetapi juga melingkupi pada penderitaan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

secara emosional seperti merasakan trauma.Penyebabnya ditunjukkan tidak hanya berdasarkan perbuatan yang disengajanya tetapi dapat juga karena kelalaiannya sendiri.

Penafsiran mengenai korban tidak saja dapat diartikan sebagai korban yang mengalami penderitaan secara langsung, namun dapat juga diartikan dengan tidak langsung dimana korban yang mengalami penderitaan yang dilakukan oleh orang lain terhadap dirinya. Misalnya seperti seorang istri yang kehilangan suaminya maupun seorang anak yang kehilangan orang tuanya juga dapat diartikan sebagai korban secara tidak langsung.

Mengarah pada arti dari korban diatas dapat disimpulkan bahwa korban sebenarnya tidak hanya orang perorangan maupun kelompok yang menderita akibat perbuatan yang memunculkan kerugan pada penderitaan yang menimbulkan kerugian penderitaan bagi dirinya sendiri atau orang kelompoknya, bahkan lebih luas lagi termasuk didalamnya keluarga dekat atau tanggungan langsung dari korban dan orang-orang yang mengalami kerugian ketika membantu korban mengatasi penderitaannya atau mencegah viktimisasi.

Berdasarkan KBBI karangan Purwadarnita yang dimaksud dengan korban, diantaranya :

1) Suatu makhluk hidup yang dikorbankan kepada dewa – dewa atau penguasa alam gaib.
2) Seseorang yang dibunuh, dianiaya, di denda, ditindas dan yang mengalami kerugian serta penderitaan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

3) Orang yang menderita kecelakaan kaerna tertimpa bencana alam, orang yang luka – luka dalam usaha menyelamatkan diri.
4) Orang yang diperlakukan secara semena – mena sehingga mengalami kerugian baik harta benda termasuk nyawa sendiri.

Sebagian aturan perundangan hokum yang berlaku di Indonesia memberikan pengertian mengenai korban diantaranya :

1) Pasal 1 ayat 3 UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan korban menyatakan "korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh sesuatu tindak pidana".
2) Didalam pasal 1 angka 3 dan angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang UUKKRmenjelaskan "korban yaitu orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan atau perampasan hak-hak dasarnya sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat termasuk korban dan ahli warisnya".
3) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang tata cara perlindungan terhadap korban dan saksi dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat menjelaskan "korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror dan kekerasan pihak manapun".(Yulia, 2010, pp. 49-52)

Korban berdasarkan maknanya dibagi atas 2 jenis, diantaranya :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

1) Korban dalam arti *sacrifice* yaitu korban yang dikaitkan dengan hal – hal yang bersifat metafisik dan supranatural
2) Korban secara keilmuan viktimologi *(Victimological)* yaitu korban akibat dari perbuatan yang dilakukan dengan sengaja karena kelalaian, korban secara sukarela, korban secara paksa, korban karena penipuan, korban bencana alam yang berakibat mengalami penderitaan baik jiwa, raga, moral dan spiritual serta kerugian harta benda.

b. Hak – Hak Korban

Masyarakat setiap harinya banyak yang mendapatkan informasi mengenai peristiwa kejahatan dari berbagai media massa cetak hingga elektronik. Peristiwa kejahatan itu tidak hanya sedikit menyebabkan berbagai derita / rugi pada korban maupun keluarganya.Demi menciptakan rasa aman dan nyaman untuk semua masyarakat dalam melakukan segala hal, maka kejahatan tersebut perlu diperbaiki denga menggunakan pendekatan yang preematif, preeventif hingga reepresif yang wajib dikerjakan secara professional bagi lembaga yang berkompeten.

Berhubungan dengan korban kejahatan sangat penting dibuat sebuah lembaga yang secara khusus menangani perkara tersebut.Tetapi awalnya butuh disampaikan lebih awal agar informasi mengenai hak – hak yang dimiliki seorang korban maupun keluarganya jika disuatu hari mengalami kerugian atas derita akibat dari kejahatan yang dirasakannya.

Hak bersifat pilihan *(optional)* yang dapat diterima maupun tidak bagi pelaku tergantung pada keadaan yang dapat mempengaruhi sikorbanyang bersifat internal atau eksternal.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Beberapa hak telah dipersiapkan untuk korban tau keluarga korban kejahatan, diantarnya :

1) Hak mendapatkan ganti rugidari penderitaan yang dialaminya. Pemberian ganti kerugian ini dapat diberikan oleh pelaku atau pihak lainnya, seperti Negara atau lembaga khusus yang dibentuk untuk menangani masalah ganti kerugian korban kejahatan.
2) Hak mendapatkan pembinaan dan rehabilitasi.
3) Hak mendapatkan perlindungan dari ancaman pelaku.
4) Hak mendapatkan bantuan hukum.
5) Hak mendapatkan kembali hak (harta) miliknya.
6) Hak mendapatkan akses atas pelayanan medis.
7) Hak diberitahu jika pelaku kejahatan dibebaskan dari tahanan sementara atau jika pelaku merupakan buronan dari tahanan.
8) Hak mendapatkan informasi dari penyidikan polisi berhubungan dengan kejahatan yang menimpa korban.
9) Hak atas kebebasan pribadi/kerahasiaan pribadi seperti merahasiakan nomor telepon atau identitas korban lainnya.

Deklarasi Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB) No.40/A/Res/34 Tahun 1985 memutuskan ada beberapa dari hak korban supaya sangat gampang untuk mendapatkan akses keadilan terkhusus pada proses peradila, diantaranya :

1) Compassion, respect and recognition.
2) Receive information and explanation about the progress of the case.
3) Provide information.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

4) *Providing proper assistance*.

5) *Protection of privacy and physical safety*.

6) *Restitution and compensation.*

7) *To acces to the mechanism of justice system.*

Dalam Pasal 5 Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban bahwa korban memilik hak yaitu :

1) Mendapatkan perlindungan keamanan pribadi, keluarga maupun harta bendanya serta lepas dari segala ancaman.
2) mengikuti tindakan pada proses memilah maupun memastikan perlindungan dan dorongan demi keamanan.
3) Memberi keterangan dengan tidak adanya tekanan sedikitpun.
4) Memperolehpenasihat.
5) Lepas semua segala pertanyaan menjerat atau menyudutkan.
6) Memperoleh kabar tentang perjalanan perkara tersebut.
7) Memperoleh kabar tentang putusan dari pengadilan.
8) Tahu mengenai terpidana yang telah dibebaskan.
9) Mendapat identitas baru.
10) Memperoleh alamat tinggal yang aman.
11) Mendapatkan biaya transportasi yang telah dipergunakan sesuai dengan keperluan.
12) Mendapat nasihat.
13) Mendapatkan biaya hidup untuk sementara sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Van Boven berpendapat bahwa hak – hak korban yaitu hak untuk tahu, hak atas keadilan dan hak atas reparasi (pemulihan) yang tertuju pada semua macam pemulihan baik secara material atau nonmaterial untuk semua korban dari pelanggaran hak asazi manusia.Hak tersebut sudah didapat diberbagai instrument – instrument setiap hak asazi manusia telah diakuimaupun didapat dalam hak asazi manusia secara internasional dari yurisprudensi komite – komite.

Arif Gosita berpendapatbeberapa hak korban itu melingkupi :

1) Mendapatkan ganti rugi atas deritanya. Pemberian ganti rugi ini wajib samaberdasarkan kesanggupan pihak pelaku sebagai sipemberi ganti rugi juga sesuai dengan keikutsertaan sipihak korban dalam terjadinya sebuah tindakan pidana tersebut.
2) Tidak menerima kompensasi demi kebutuhan pelaku yang artinya tidak menerima kompensasi sebab tidak membutuhkannya.
3) Memperoleh restitusi / kompensasi bagi ahli waris jika pihak sikorban meninggal dunia akibat perbuatan tersebut.
4) Mendapatkan pelatihan dan pemulihan.
5) Memperoleh kembali hak yang telah dimilikinya.
6) Memperoleh suatu perlindungan hukum dari segala ancaman dari pihak pelaku jika melaporkan dan jadi saksi.
7) Memperoleh suatu bantuan penasehat hukum.
8) Menggunakan upaya hukum *(rechtmidden).*

Dalam KUHAP terdapat kurang lebih sepuluh asas – asas hukum acara pidana yang lebih mengutamakan hak – hak bagi tersangka, diantarnya :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

1) Diperlakukan dengan baik tanpa adanya pembedaan sedikitpun.
2) Sebuah praduga yang tak bersalah.
3) Melanggar hakperorangan warganegara (seperti mengenaitindakan untuk melakukan penangkapan dan melakukan penahanan serta untuk melakukanpenggeledahan maupun melakukan penyitaan) wajib bersumber dariaturan yang berlaku dengan adanya surat perintah dari instansi yang berwenang.
4) Tersangka harus diberitahu mengenai dugaan terhadap dakwaan yang diberikan kepada tersangka.
5) Setiap terdakwa memiliki hak untuk memperoleh sebuah bantuan dari penasehat hukum.
6) terdakwamemiliki hak untuk datang di pengadilan selama persidangan berlangsung.
7) Adanya sebuah peradilan bebas dan dapat dilaksanakan secara cepat dan sederhana.
8) Peradilan wajib terbuka untuk khalayak ramai.
9) Tersangka maupun terdakwa memiliki hak untuk memperoleh restitusi atau ganti kerugian maupun pemulihan.
10) Kewajiban sebuah pengadilan agar mengawasi penerapan terhadap segala putusan – putusannya.

Secara normative dari kesepuluh asas diatas, Kuhap cuman mencermati hak – hak dari pelaku kejahatan saja dengan tidak memberikan peluang bagi korban kejahatan dalam memperjuangkann hak – hak yang juga dimilikinya.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

c. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban

Secara formal bagi korban kejahatan sering dituntut mengenai pelayanan dan perlakuannya dikarenakan bentuk perlindungan dan konsekuensi hukumnya.Awalnya mengenai bentuk perlindungan korban tidak ada yang mengaturnya secara tegas hingga mengakibatkan ketidakrelatifan untuk menjamin hukum bagi korban dan pelaku kejahatan sehingga menyebabkan ketidakadilan.

Perlunya diberikan perlindungan hukum bagi korban kejahatan dengan lebih memadai agar tidak hanya menjadi masalah nasional saja, tapi juga harus secara internasional.Sebab itu permasalahan tersebut mendapatkan perhatian yang lebih serius yang dapat dilihat dari bentuknya yaitu"*Declaration of Basic Principal of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* oleh PBB".Pada deklarasi PBB disusun bentuk perlindungan korban yang dapat diserahkan terhadap korban, diantaranya "*Acces to justice and fair treatment, Restitution, Compensation, Assistance".*

Pemberian restitusi dan kompensasi, pelayanan medis dan bantuan humum merupakan bentuk perlindungan hukum korban yang dapat diberikan pada masyarakat.

Bentuk perlindungan yang dapat diberikan kepada setiap korban, diantaranya :

1) Ganti Rugi, dpasal 99 ayat (1) dan (2) KUHAP lebih ditekankan kepada menggantikan biaya yang digunakan oleh pihak yang telah dirugikan seperti korban. Berdasarkan sudut pandang keperluan korban mengenai ganti rugi terdapat 2 manfaat*pertam,* guna mencukupi kerugian secara material dari

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

semua biaya yang sudah dikeluarkannya,*kedua,* untuk kepuasan terhadap ego korban. Sementaradipandang dari sudut kepentingan sipelaku, keharusan untuk ganti rugidiberikan dalam bentuk pidana yang diberikan kepada pelaku dan sangat dirasakan oleh sipelaku sebagai perbuatan yang konkrit hingga secara tidak langsung berhubungan dengan perbuatan yang salah yang dilakukan oleh pelaku.

Ada lima bentuk tujuan dari kewajiban ganti rugi yang dikemukakan oleh Gelaway, diantaranya :

a) Ngeringankan sedikit penderitaan korban.
b) Unsure untuk ngeringankan hukaman yang diberikan kepada tersangka.
c) Sebagai cara agar dapat merehabilitasi seorang terpidana.
d) Mempercepat proses jalannya persidangan.
e) Untuk ngurangi ancaman maupun tindakan masyarakat seperti balas dendam.

Inti dari tujuan memberikan ganti rugi tidak lain hanya demi menciptakan kedailan dan kesejahteraan korban yang merupakan anggota masyarakat dan sebagai tolak ukur melaksanakannya untuk diberikannya kesempatan bagi korban dalam mengembangkan suatu hak dan kewajibannya sebagai umat manusia. Atas landasan itulah program pemberian ganti rugi pada korban merupakan penggabungan usaha dari berbagai jenis pendekatan baik dalam bidang kesejahteraan social, kemanusiaan maupun dengan sistem pendekatan peradilan pidana.

2) Restitusi *(restitution),* harus mengarahkan daripertanggungjawaban pelaku terhadap akibat yang ditimbulkan oleh kejahatan sehingga sasaran utamnya

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

adalah menanggulangi semua kerugian yang diderita korban. Tolak ukur yang digunakan dalam menentukan jumlah rezstitusi yang diberikan tidak mudah dalam merumuskannya. Hal ini tergantung pada status social pelaku dan korban. Dalam hal korban dengan status social lebih rendah dari pelaku, akanmengutamakan ganti kerugian dalam bentuk materi dan sebaliknya jika status korban lebih tinggi dari pelaku maka pemulihan harkat serta nama baik akan lebih diutamakan.

3) Kompensasi, adalah suatu wujud bantuan yang bisa dipandang sebagai aspek kemanusiaan dari hak – hak asasi. Agar terdapat gagasan menciptakan kesejahteraan social masyarakat dengan berlandasan pada komitmen kontrak sosial dan solidaritas social menjadikan masyarakat dan Negara bertanggung jawab dan berkewajiban secara moral untuk melindungi warganya, khususnya mereka yang mengalami musibah sebagai korban kejahatan. Kompensasi sebagai bentuk santunan yang sama sekali tidak tergantung bagaimana berjalannya proses peradilan dan putusan yang dijatuhkan, bahkan sumber dana untuk itu diperoleh dari pemerintah atau dana umum.(Yulia, Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan, 2010, pp. 57-61)

Perlindungan berdasarkan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban "segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai denga ketentuan".Perlindungan tersebut memang diberikan bagi semua tahap proses peradilan pidana dalam lingkungan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

peradilan. Sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 3 Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban mendefinisikan LPSK adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak – hak lain kepada saksi dan korban.

Bentuk – bentuk perlindungan berdasarkan Undang - undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang diberikan LPSK bagi korban dapat dikategorikan sebagai berikut :(Mansur & Gultom, 2007, pp. 151-155)

1) Perlindungan fisik dan psikis, yaitu pengamanan dan pengawalan, penempatan di rumah aman, mendapat identitas baru, bantuan medis dan pemberian kesaksian tanpa hadir langsung di pengadilan, bantuan rehabilitasi psiko-sosial.
2) Perlindungan hukum, keringanan hukuman dan saksi dan korban serta pelapor tidak dapat di tuntut secara hukum.
3) Pemenuhan hak procedural saksi, pendampingan, mendapatkan penerjemah, mendapat informasi mengenai perkembangan kasus, penggantian biaya transportasi, mendapat nasihat hukum, bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan.

2. Pelaku Kejahatan

a. Pengertian Pelaku Kejahatan

Membahas tentang sebuah kejahatan, harus diperbedakan lebih dulu tentang kejahatan dalam arti yuridis (tindakan yang termasuk kedalam sebuah tindak pidana) dan kejahatan dalam arti sosiologis (tindakanyang harus dipidanakan).

Tindakan yang masuk dalam tindak pidana yaitu tindakan yang melanggar aturan undang – undang sedangkan tindakan yang harus dipidanakan yaitu

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

tindakan yang melanggar norma maupun kesusilaan yang terdapat dalam masyarakat tapi tidak diatur didalam perundang – undangan yang berlaku.

Kejahatan berdasarkan hukum pidana yaitu semua tindakan yang diperbuatan melanggar rumusan dalam kaidah aturan hukum pidana yang artinya terpenuhinya unsure – unsure delik, hingga tindakan itu dapat dijatuhi hukuman.Ultrech mengungkapkan kejadian pidana sama halnya dengan konsep kejahatan yang secara yuridis artinya sebagai suatu kejadian oleh undang-undang ditentukan sebagai suatu peristiwa yang menyebabkan dijatuhkan hukuman.

Kejahatan dalam konsep yuridis juga berarti tingkah laku manusia yang dapat dihukum berdasarkan hukum pidana.Sejalan dengan pengertian tersebut Wirjono Prodjodikoro mengatakan tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana.Sedangkan menurut Van Hattum mengatakan bahwa suatu peristiwa pidana adalah suatu peristiwa yang menyebabkan hal seseorang (pembuat) mendapatkan hukuman atau dapat dihukum.

Dari beberapa pengertian diatas, dapat diketahui bahwa kejahatan dalam arti yuridis adalah kejahatan yang diatur oleh undang-undang atau dengan kata lain setiap perbuatan yang oleh undang - undang ditentukan sebagai kejahatan.

Sahetapy mempunyai pandangan mengenaikejahatan yang berisi sugesti tentu yang berupa suatu arti dan penamaan secara relative berisi keberagaman dan dinamik yang terikat atas tindakan maupun kelakukan (baik secara aktif ataupun secara pasif) yang dinilai sebagia besar atau sebagian kecil masyarakat pada

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

sebuah tindakan anti social bagi skala nilai maupun keserasaan hukum yang hidup didalam masyarakat sesuai pada ruang dan waktu.

Paul Moedidikno merumuskan perilaku kejahatan yang anti social ini dengan kata - kata yang merugikan, menjengkelkan dan tidak dapat dibiarkan berlangsung, sebab apabila berlangsung akan mengakibatkan masyarakat menderita sesuatu yang tidak diinginkan. Maka dilihat dari sudut ini jelaslah bahwa rumusan - rumusan kriminologi dalam member arti terhadap perilaku tertentu yang anti social, sebenarnya akan sangat bermanfaat bagi badan pembuat undang-undang dalam upayanya tidak saja merumuskan undang - undang pidana baru, juga dalam hal penyempurnaan dan pembaharuan undang - undang pidana kearah terbentuknya undang-undang pidana yang terwarnai oleh penelitian kriminologis sehingga dengan demikian dapat dihindarkan deskrepansi antara undang - undang pidana dan citra masyarakat yang gandrung akan tertanggulanginya perbuatan anti social.

Arif Gosita mengatakan kejahatan yaitu bentuk interaksi adanya interelasi antar kejadian yang terjadi yang sangat saling berpengaruh.Kejahatan tersebut diartikannya secara luas yaitu kejahatan bukan hanya yang didalam undang – undang yang telah berlakunamun termasuk perbuatan menyebabkan derita yang salah dan diakui jahat, dimana tidak diatur didalam undang – undang karena keadaan maupun kondisi secara tertentu.

Kejahatan dapat dipandang dari 2 sudut yaitu secara subjektif artinya melihat kejahatan dari sudut pandang orang lain yang perbuatnnya bertolak belakang terhadap kesusilaan, sedangkan secara objektif artinya melihat kejahatan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

pada sudut pandang rugi yang telah dirasakan masyarakat karena pengaruh dari perbuatan yang telah dilakukan oleh seseorang.

Perbuatan jahat yaitu tindakan anti social maksudnya segala perbutan yang diakui jahat bagi masyarakat. Sejatinya tidak ada perbuatan yang dianggap jahat secara kodrati selain bergantung dari sudut pandang masing – masing masyarakatnya yang menganggap apa perbuatan tersebut jahat atau tidak tergantung dari masyarakatnya yang telah member label dari sebuah tindakan yang telah dicap jahat. Dengan demikian kejahatan merupakan tindakan sangat anti social yang mendapatkan larangan sangat sadar dari Negara seperti memberi kederitaan (hukuman atau perbuatan)

Teori kriminologi menyatakan mengenai sebab – sebab kenapa kejahatan tersebut dapat terjadi, diantaranya teori biologis yang mengakui bakat penyebab utama terjadinya kejahatan.Bakat itulah yang telah diwariskan nenek moyang hingga kejahatan diakui sebagai tindakan yang turun temurun.Teori misalnya aliran sosiologis mengakui factor penyebab kejahatan yaitu lingkungan.Kejahatan bisa terjadi dari factor lingkungan yang sangat buruk, hingga penjahat dimisalkan sedang terkena virus penyakit disekitarnya.

b. Peranan Korban dalam terjadinya kejahatan

Jika mencermati mengenai permasalahan kejahatan berdasarkan proporsi yang benar secara dimensional, hingga kita wajib melihat kedudukan korban sehingga menyebabkan terjadinya tindakan kejahatan, dikarenakan mengenai masalah korban bukanlah masalah yang sangat baru, akan tetapi permasalahan tersebut kurang mendapatkan perhatian yang baik bahkan sering diabaikan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Peranan yang dimaksudkan yaitu sikap maupun perilaku dari seseorang yang akan jadi calon korban ataupun yang bisa mendorong seseorang untuk melakukan kejahatan. Dalam hal ini korban sangat memiliki peran fungsional untuk terjadinya kejahatan.Tapi kenyataannya bisa dibilang tindakan kriminaltidak terjadi bila tidak adanya korban dari tindakan kriminal dimana kejahatan tersebut mengakibatkan korban mengalami pendiritaan.

Didalam studi mengenai kejahatan dapat dibilang suatu kejahatan tidak terjadi bila tidak ditemukannya korban dari kejahatan tersebut.Sehingga dari sisi lain diketahui juga kejahatan tanpa adanya korban*"crime without victim"*tetapi wajib dimaksudkan suatu kejahatan yang tidak menyebabkan adanya korban seperti tindak pidana penyalahgunaan obat terlarang, bermain judi dan melakukan aborsi yang mana korban sendiri yang mencakup menjadi pelaku kejahatan.

Korban dari suatu kejahatan yang memainkan bermacam peran yang dapat menyebabkan sebuah tindakan kriminal yaitu korban memiliki status sebagai peserta yang pasif atau aktif. Pelaksanaan terhadap peran korban dipengaruhi karena keadaan maupun kondisi yang dengan langsung maupun tidak dengan langsung dimana penyebabdari kejahatan tersebut hasil tidak akan selalu sama terhadap korban.

Peran korban kejahatan tersebut berkaitan dengan tindakan apa saja yang diperbuat korban. Terhadap korban maupun pelaku memiliki ikatan fungsional hingga dalam terjadi kejahatan biasanya korban yang bertanggungjawab. Peran korban tersebut memiliki penyebab dan pengaruh pada si korban maupun pihaknya, orang lain maupun pada lingkungan sekitarnya.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Korban bisa berperan dengan kondisi sadar maupun tidak sadar, langsung maupun tidak, individu maupun sama – sama, bertanggungjawab maupun tidak, lebih aktif maupun pasif, adanya motivasi positive atau negative yang semua hal itu bergantung kepada kedaan maupun kondisi ketika perbuatan jahatitu sedang berjalan. Perlunya peranan korban dihubungkan dengan set peranan korban yaitu sejumlah peranan yang berkaitan, interdipenden dan komplementer.

Keadaan situasi maupun kondisi korban bisa mengundang pelaku untuk berbuat jahat pada korban.Dimana korban itu sendiri tidak ada melakukan tindakan dan juga tidak berkeinginan menjadi korban dari kejahatan tersebut. Keadaan kondisi maupun situasi yang terdapat pada korban yang mengundang untuk terjadinya kejahatan bisa mendorong orang lain untuk berbuat jahat sebab sering terjadi antara korban dan pelaku tidak memiliki hubungan tetapi sering juga terjadi antara korban maupun pelaku saling memiliki hubungan. Hingga keadaan suasana maupun kondisi ini juga berkaitan karena lemahnya jasmani maupun rohani terhadap si korban.

Permasalahan mengenai korban lebih sering diabaikan dan tidak dipedulikan padahal permasalahan ini bukan lagi masalah baru.Jika memperhatikan permasalahan mengenai korban berdasarkan proporsinya secara dimensional, kepedulian kita enggak bakalan lolos dari peran korban yang mengakibatkan terjadi suatu perbuatan jahat.Korban mempunyai peranan yang fungsional dalam terjadinya suatu kejahatan.Pada kenyataannya dapat dikatakan bahwa tidak mungkin timbul suatu kejahatan kalau tidak ada si korban kejahatan yang

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

merupakan peserta utama dari si penjahat dalam hal terjadinya suatu kejahatan dan hal pemenuhan kepentingan si penjahat yang berakibat penderitaan si korban.

Hentigberpendapat ada beberapa tindakan jahat yang muncul dari peran korban, yaitu:(Sahetapy, 1987, p. 117)

a) Si korban menginginkan kejahatan tersebut terjadi.
b) Sikorban menjadikan kerugian yang dialaminya dari kejahatan tersebut untuk mendapatkan keuntungan yang sangat besar.
c) Akibat yang membuat sikorban mengalami kerugian bisa saja kerjasama antara korban dan pelaku.
d) Jika tidak adanya provokasi dari sikorban maka ganti rugi akibat kejahatan tersebut tidak aka nada.

Hal – hal yang berkenaan dengan peranan korban kejahatan, diantarnya:(Rena, 2010, p. 75)

a) Apa yang dikerjakan oleh korban.
b) Bilamana dikerjakan sesuatu.
c) Dimana tindakan itu dikerjakan.

Tanpa adanya korban tidak mungkin adanya kejahatan.Dalam hal ini peranan korban mempunyai akibat dan pengaruh bagi diri korban serta pihak-pihak lain dan lingkungannya.Antara pihak korban dan pelaku terdapat hubungan fungsional, bahkan dalam kejahatan tertentu pihak korban dikatakan bertanggungjawab.

Dalam implementasinya korban memiliki hak yang wajib dipenuhi walau korban juga berperan dalam terjadinya suatu kejahatan.Dilihat dari beberapa hak

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

yang dimiliki korban berdasarkan uraian diatas dikehendaki agar masyarakat mengerti korban juga memiliki hak yang wajib dihargaiseperti pantasnya manusia yang juga merupakan anggota dari masyarakat.Sama halnya pada pelaku kejahatan yang menyebabkannya jadi korban, tindakan yang menghakimi sendiri yaitu seperti halnya pada korban lainnya, mereka sama mempunyai hak yangsama dengan korban lainnya dikarenakan mereka juga termasuk sebagai korban dari kejahatan.(Rena, 2010, p. 82)

c. Hubungan Korban Kejahatan dan Pelaku Kejahatan

Korban mempunyai peranan yang fungsional dalam terjadinya suatu kejahatan. Perbuatan pelaku dapat mengakibatkan orang lain menjadi korban sebagaimana dikemukakan oleh Samuel Walker bahwa hubungan antara korban dan pelaku adalah hubungan sebab akibat. Akibat perbuatan pelaku yaitu suatu kejahatan dan korban yang menjadi objek sasaran perbuatan pelaku menyebabkan korban harus menderita karena kejahatan.

Kerugian yang dialami oleh korban akibat terjadinya suatu kejahatan tidak selalu berupa kerugian metril atau penderitaan fisik saja, tetapi yang paling besar pengaruhnya adalah kerugian atau dampak psikologis.Korban kejahatan bisa terus merasa dibayang – bayangi oleh kejahatan yang telah menimpanya yang dapat menghalanginya untuk beraktivitas dalam kehidupannya sehari – hari.

Secara sosiologis dapat dikatakan bahwa dalam kehidupan masyarakat semua warga Negara berpartisipasi penuh atas terjadinya kejahatan sebab masyarakat dipandang sebagai sebuah sistem kepercayaan yang melembaga *(system of institutionalized trust).*Tanpa kepercayaan ini, kehidupan social tidak

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

mungkin berjalan dengan baik sebab tidak ada patokan yang pasti dalam bertingkah laku. Kepercayaan terpadu melalui norma – norma yang diekspresikan di dalam struktur organisasional.

Sering sekali ikatan antara korban dan pelaku bersifat personil yang dapat dilihat dari bermacam bentuk perbuatan jahat mengaitkan keluarga seperti terjadi didalam rumah tangga.Bentuk perbuatan jahat tersebut selalu terjadi hubungan antar korban dan pelaku yang semakin membuat ketakutan dari korban untuk melakukan perbuatan.

E. Kristi mengungkapkan didalam kekerasan bagi wanita yang memiliki kaitan antar pelaku dan korban sangat bermacam pelakunya, diantaranya :(Mansur & Gultom, urgensi perlindungan korban kejahatan antar norma dan realita, 2007, pp. 60-63)

a) Orang lain/tidak dikenal, pendamping (suami), pasangan lain (pacar, tunangan, mantan suami), kawan, keluarga inti maupun teman sepekerjaan.
b) Orang yang memiliki kekuasaan, majikan, guru, pemberi jasa (penasihat, tabib, staf social).
c) Negara atau wakilnya, anggota polisi maupun anggota militer dan penguasa (seseorang yang memiliki kedudukan sebagai penguasa).

Bambang Waluyo mengatakan ikatan antar korban dan kejahatan yaitu pihak yang jadi korban karena penyebab dari tindakan jahat.Karena jika ada asap pasti akan ada api, dimana pihat itu akan jadi korban sebab adanya pihak lain yang berbuat jahat. Dengan begitulah anggapan yang sangat tegas selama itu yang

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

didukung dengan kenyataan yang telah terbukti walaupun pada prakteknya terdapat perubahan yang berkembang.(Waluyo B. , 2011, p. 18)

Persetubuhan yaitu tindakan kekerasan yang berhubungan pada tindak pidana asusila.bermacam factor – factor munculnya perbuatan jahat yang satunya dukung dengan keadaan kawasan dan letak korban ditempat bias mendorong tersangka berbuat tindakan kejahatan seksual (persetubuhan). Enggak sering pula di pengaruhi dengan factor menggunakan ikatan antar tersangka maupun korban misal ikatan darah, saudara, kerabat.Hingga tersangka dengan muda melaksanakan persetubuhan sebab diketahui dahulu oleh pihak korban.

Selain itu dapat pula factor pemicu timbulnya tindak pidana persetubuhan yang dirangsang oleh pengaruh lingkungan sekitar pelaku, seperti halnya pelaku setelah melihat atau menyaksikan hal – hal yang berkaitan dengan pornoaksi dan pornografi dan timbulnya hasrat seksual pelaku. Sehingga pelaku ingin melampiaskan hasratnya tersebut dengan berbagai cara salah satunya adalah persetubuhan.

Dari setiap tindak pidana persetubuhan terdapat keterkaitan antara pihak pelaku, pihak korban dan situasi serta kondisi lingkungan yang memegang peranan masing – masing sebagai pemicu adanya suatu kejahatan kekerasan seksual yaitu persetubuhan.

Terhadap terjadinya persetubuhan pelaku merupakan factor individu yang menyalur hasrat nafsunya dengan tak wajar.Pihak korban merupakan factor kriminogen yang langsung maupun tidak mendorong munculnya kejahatan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

persetubuhan.Lingkungan yaitu factor dukungpada keadaan pelaku dan korban saat berbuat perbuatan persetubuhan.(Kristiani, 2014, pp. 378-379)

C. Tinjauan Tentang Tipe – Tipe Korban

Perkembangan ilmu viktimologi selain mengajak masyarakat untuk lebih memerhatikan posisi korban juga memilah – milah jenis korban hingga kemudian muncullah berbagai tipe – tipe korban yaitu sebagai berikut :

Berdasarkan derajat kesalahannya Mendelsohn membedakan korban dalam lima jenis, diantaranya :

1) *The completely innocent victim,* yaitu korban yang sama sekali tidak bersalah. Oleh Mendelsohn dianggap sebagai korban ideal yang cenderung terjadi pada anak – anak dan mereka juga tidak menyadari ketika ia menjadi korban.
2) *The victim with minor guilt and the victim due to his ignorance,* yaitu korban dengan kesalahan kecil atau kelalaian. Misalnya seperti seorang wanita yang menggoda tetapi salah alamat, sebagai akibat maalah dia menjadi korban.
3) *The victim as guilty as the offender and voluntary victim,* yaitu korban yang sama salahnya dengan sipelaku dan korban sukarela ini oleh Mendelsohn dibagi menjadi beberapa sub tipe sebagai berikut :
    a) Bunuh diri (dengan melemparkan uang logam).
    b) Bunuh diri dengan adhesi.
    c) Euthanasia.
    d) Bunuh diri yang dilakukan suami isteri (misalnya pasangan suami isteri yang putus asa karena salah satu pasangan sakit).

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

4) *The victim more guilty than the offender,* yaitu kesalahan korban lebih besar dari pelaku. Terdapat dua tipe yakni :

   a) Korban yang memancing dan atau menggoda seseorang untuk berbuat jahat.

   b) Korban lalai yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan kejahatan.

5) *The most guilty victim and the victim as is guilty a lone,* yaitu korban yang salah sendiri maupun korban yang sangat salah seperti kejadian pda seorang korban yang lebih bernafsu untuk melakukan tindakan kejahatan tapi akhirnya malah dia sendiri yang jadi korban atas perbuatannya (seperti penyerbu meninggal karena pembelaan diri dari seseorang yang diserbu).

6) *The simulating simulating victim and imagine victim,* yaitu korban angan – angan maupun korban yang pura - pura. Contohnya seseorang yang mengatakan dirinya menjadi korban dari kejahatan untuk keperluannya sendiri atau orang yang hysteria, paranoid maupun yang sudah pikun.

Von Hentig memisahkan ada enam golongan korban dilihat dari kondisi kejiwaan korban, diantaranya :(Mansur & Gultom, 2008, p. 39)

1) The depressed, who are weak and submissive.

2) The acquasitive, who succumb to confidence games and racketeers.

3) The wanton, who seek escapimin forbidden vices.

4) The lonesome and heartbroken, who are susceptible to theft and fraud.

5) The tormentors, who provoke violence.

6) The blocked and fighting, who are unable to take normal defensive measures.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Ezzat Abde Fattah mengungkapkan ada beberapa tipologi korban berdasarkan perspektif tingkat keterkaitan korban dalam terjadinya suatu kejahatan, diantaranya :

1) *Nonparticipating victims* adalah mereka yang tidak mau ikut berpartisipasi dalam menyelesaikan suatu masalah kejahatan namun menolak atau menyangkal kejahatan tersebut terjadi.
2) *Latent or predisposed victims*yaitu mereka sering menjadi korban dalam kejahatan tertentu dikarenakan memiliki sebuah karakter yang lebih cenderung.
3) *Provocative victims* adalah mereka sendiri menyebabkan kejahatann itu terjadi.
4) *Participating victims* adalah mereka sendiri membuat dirinya menjadi korban karena ketidaksadarannya sendiri.
5) *False victims* adalah mereka membuat dirinya untuk jadi korban suatu tindakan criminal.

Stephen Schafer mengungkapkan tipologi korban menjadi tujuh bentuk dilihat berdasarkan perspektif tanggungjawab korban itu sendiri, diantaranya :

1) *Unrelated victims* adalah mereka yang jadi korban karena potensial walau tidak memiliki hubungan dengan pelaku. Maka tanggungjawab sepenuhnya berada pada pihak korban.
2) *Provocative victims* merupakan korban yang karena perbuatannya terjadi suatu kejahatan. Maka tanggungjawab ditanggungsecara bersama – sama antara korban dan tersangka.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

3) *Participating victims*yaitu tindakan sebenarnya enggak disadari korban bisa mendorong pelaku melakukan kejahatn. Contohnya, ketika seseorang mengambil uang dari bank dengan jumlah sangat banyak dengan tidak adanya pengawalan dan uang tersebut dibungkus dengan menggunakan tas plastic hingga menyebabkan orang lain untuk merampasnya. Pertanggungjawaban pada aspek ini seluruhnya ditanggung oleh pelaku.
4) *Biologically weak victim* adalah tindakan jahatdiakibatkan karena kondisirohani korban seperti perempaun, anak kecil dan orang dewasa yang lanjut usia (manual) yang berpotensi untuk menjadi korban. Pertanggungjawaban pada aspek ini terletak kepada masyarakat maupun pemerintahan setempat karena enggak bisa melindungi orang yang lemah.
5) *Socially weak victims*yaitu korban enggak ada kepedulian dari masyarakat yang terkait. contohnya gelandangan dengan posisi social lemah. Pertanggungjawabannya sepenuhnya pada penjahat atau masyarakat.
6) *Self victimizing victims*yaitu suatu perbuatan jahat dibuat korban itu sendiri (korban semu) atau perbuatan jahatdengan tidaka adanya korban. pertanggungjawabannyaberada pada si korban yang merupakan pelaku dari kejahatan tersebut terjadi.
7) *Political victims*yaitu korban yang disebabkan oleh musuh dalam bidang politiknya. Dari sudut sosiologis korban tersebut enggak bisa mendaptkan pertanggungjawaban terkecuali dengan adanya perubahan terhadap konstelasi politiknya.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Sellin dan Wolfgang mengelompokkan korban menjadi beberapa kelompok, diantaranya :(Mansur & Gultom, 2008, p. 50)

1) *Primary victimization*artinya korban yang merupakan individual seperti satu orang tidak berkelompok.
2) *Secondary victimization*artinya korban yang berkelompok seperti suatu badan hukum.
3) *Tertiary victimization*artinya korban yang merupakan kumpulan dari kelompok banyak.
4) *No victimization*artinya korban yang tidak dikenal seperti seorang pelanggan yang kena tipu saat memakai sebuah barang.

D. Tinjauan Tentang Pembuktian

Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan penting dalam proses pemeriksaan Siding pengadilan serta hal paling utama untuk dapat menentukan dapat atau tidaknya seorang terdakwa dijatuhi pidana. Oleh karena itu, untuk dapat dijatuhkan pidana kepada terdakwa harus diupayakan pembuktian tentang apa yang didakwakan kepada terdakwa sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan. Melalui pembuktianlah ditentukan nasib terdakwa. Apabila hasil pembuktian dengan alat - alat bukti yang ditentukan undang - undang "tidak cukup" membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, terdakwa "dibebaskan" dari hukuman sesuai Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang isinya "Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di siding kesalahan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas."

Pembuktian adalah suatu proses bagaimana alat - alat bukti tersebut dipergunakan, diajukan ataupun dipertahankan, sesuatu hukum acara yang berlaku. (Waluyo B. , 1991, p. 3)

Pembuktian ditinjau dari segi hukum acara pidana adalah ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran. Baik hakim, penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum, semua terikat pada ketentuan tata cara dan penilaian alat bukti yang ditentukan oleh undang - undang. Tidak boleh leluasa bertindak dengan caranya sendiri dalam menilai pembuktian. Dalam mempergunakan alat bukti, tidak boleh bertentangan dengan undang - undang. Terdakwa tidak bisa leluasa mempertahankan sesuatu yang dianggapnya benar di luar ketentuan yang telah digariskan undang - undang.

Hukum pembuktian merupakan seperangkat kaidah hukum yang mengatur tentang pembuktian, yakni segala proses dengan menggunakan alat - alat bukti yang sah dan dilakukan tindakan - tindakan dengan prosedur khusus guna mengetahui fakta - fakta yuridis di persidangan (Alfitra, 2011 : 21). Sesuai dengan apa yang telah diuraikan diatas mengenai pembuktian, maka yang sebenarnya pembuktian itu hanya diperlukan dalam perkara maupun persengketaan dimuka hakim atau pengadilan.

Sistem pembuktian hukum acara pidana bertujuan untuk menilai alat bukti dalam perkara yang sedang diperiksa. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

yang berisi pedoman tata cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan terhadap terdakwa. Pembuktian merupakan bagian terpenting dalam sidang pengadilan karena dengan pembuktian akan tampak apakah terdakwa bersalah atau tidak bersalah. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang "tidak cukup kuat" membuktikan kesalahan yang didakwakan maka terdakwa "dibebaskan" dari hukuman. Sebaliknya, kalau kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 KUHAP maka terdakwa dinyatakan "bersalah", kepadanya akan dijatuhkan hukuman.

Hukum Indonesia menganut sistem pembuktian negatif yakni menggabungkan unsur keyakinan hakim dengan unsur pembuktian menurut undang-undang. Kedua unsur tersebut harus terpenuhi ketika hakim menjatuhkan putusan bebas atau bersalah. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 183 KUHAP yang berbunyi "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya".

Alat bukti yang sah menurut KUHAP dapat dilihat dengan menghubungkan Pasal 183 dengan Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Pada Pasal 184 ayat (1) KUHAP telah dibuktikan secara limitatif alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang yaitu :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

1. Keterangan Saksi.

Penjelasan terkait keterangan saksi terdapat dalam Pasal 1 angka 27 KUHAP yaitu salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Ditinjau dari segi nilai dan kekuatan pembuktian atau "the degree of evidence". Agar keterangan saksi dapat dianggap sah sebagai alat bukti yang memiliki nilai kekuatan pembuktian, harus dipenuhi aturan ketentuan sebagai berikut :

a. Harus mengucap sumpah atau janji. Hal ini diatur dalam Pasal 160 ayat (3), sebelum saksi memberikan keterangan"wajib mengucapkan" sumpah atau janji. Adapun sumpah menurut cara agamanya masing-masing serta lafal sumpah atau janji berisi bahwa saksi akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya tiada lain dari yang sebenarnya.
b. Keterangan saksi harus diberikan di sidang pengadilan. Agar keterangan saksi menjadi alat bukti yang sah, maka sesuai Pasal 185 ayat (1) keterangan saksi yang berisi penjelasan tentang apa yang ia dengar sendiri, dilihatnya sendiri atau dialaminya sendiri terhadap peristiwa pidana, baru dapat bernilai alat bukti apabila keterangan saksi dinyatakan di sidang pengadilan.
c. Keterangan seorang saksi saja dianggap tidak cukup. Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 185 ayat (2) KUHAP yaitu untuk dapat membuktikan kesalahan terdakwa paling sedikit harus didukung oleh "dua orang saksi"

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

atau kalau saksi yang ada hanya seorang saja maka kesaksia tunggal itu harus "dicukupi" atau ditambah dengan salah satu alat bukti yang lain.

2. Keterangan Ahli

Keterangan ahli diatur di dalam Pasal 1 angka 28 KUHAP yaitu keterangan yang diberikan seorang ahli yang memiliki keahlian khusus tentang masalah yang diperlukan penjelasannya dalam suatu perkara pidana yang sedang diperiksa, maksud keterangan khusus dari ahli, agar perkara pidana yang sedang diperiksa menjadi terang demi untuk penyelesaian pemeriksaan perkara yang bersangkutan.

Sedang keterangan yang diberikan seorang ahli, tapi tidak mempunyai keahlian khusus tentang suatu keadaan yang ada hubunganya dengan perkara pidana yang bersangkutan, tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang.

3. Alat bukti Surat

Menurut ketentuan Pasal 187 KUHAP surat yang dapat dinilai sebagai sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang ialah surat yang dibuat atas sumpah jabatan atau surat yang dikuatkan dengan sumpah. Bagaimanapun sempurnanya nilai pembuktian alat bukti surat, kesempurnaan itu tidak merubah sifatnya menjadi alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang mengikat. Nilai kekuatan yang melekat pada kesempurnaannya tetap bersifat kekuataan pembuktian yang bebas. Hakim bebas untuk menilai kekuatan dan kebenarannya dari asas kebenaran sejati maupun dari sudut batas minimum pembuktian.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

4. Alat bukti Petunjuk

Alat bukti petunjuk sabagaimana yang terdapat dalam Pasal 188 ayat (1) KUHAP, Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuainnya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Penerapan alat bukti petunjuk dalam persidangan juga terdapat dalam Pasal 188 ayat (3), yaitu penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya.

Kekuatan pembuktian alat bukti petunjuk berupa sifat dan kekuatannya dengan alat bukti yang lain. Kekuatan pembuktian petunjuk oleh hakim tidak terikat atas kebenaran persesuain yang diwujudkan oleh petunjuk. Oleh karena itu hakim bebas menilainya dan mempergunakannya sebagai upaya pembuktian.

5. Keterangan Terdakwa

Alat bukti keterangan terdakwa merupakan urutan terakhir dalam Pasal 184 ayat (1). Terkait dengan keterangan terdakwa terdapat dalam Pasal 189 ayat (1) KUHAP. Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Pada prinsipnya keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan atau diberikan terdakwa di sidang pengadilan. Adapun apa yang terdakwa terangkan dalam pemeriksaan pendahuluan dahulu itu bukan merupakan suatu bukti yang sah, ia hanya dapat digunakan untuk membantu menerangkan bukti di sidang

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

pengadilan. Dan hanya dapat digunakan terhadap terdakwa sendiri. Untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka keterangan terdakwa itu harus ditambah lagi dengan satu alat bukti yang lain misalnya dengan keterangan saksi, satu keterangan ahli atau satu surat maupun petunjuk.

Dengan demikian, telah jelaslah pembuktian yang dimaksud dalam KUHAP. Bahwa untuk menentukan seorang bersalah atau tidak maka harus dilaksanakan sesuai amanah Pasal 183 KUHAP yaitu berdasarkan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud pasal 184 ayat (1) dan keyakinan hakim.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Pembuktian Oleh Penuntut Umum Untuk Melakukan Penuntutan Dilihat Dari Peran Korban Dalam Terjadinya Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Dibawah Umur (Studi Kasus Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-O5/PEKAN/01/2019)

Dalam suatu tindak pidana sering kali terdapat hubungan antara pelaku dan korban baik secara langsung maupun tidak langsung.Terkadang korban memilik peran yang bisa menimbulkan terjadinya suatu perbuatan pidana, dalam kaitannya seperti ini jaksa penuntut umum harus cermat dan teliti dalam melihat hubungan antara korban dan pelaku, sehingga dalam melakukan penuntutan jaksa dapat mengungkap kebenaran materil sehingga terciptanya kebenaran dan keadilan yang diinginkan.

Mengenai masalah proses pembuktian oleh jaksa penuntut umum untuk melakukan penuntutan dilihat dari peran korban dalam terjadinya tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur, merupakan suatu tujuan dari sistem pumbuktian yang terdapat didalam hukum acara pidana (KUHAP) yaitu untuk menilai alat bukti dalam perkara yang diperiksa berisi ketentuan – ketentuan mengenai tata cara yang dibetulkan oleh undang – undang dalam membuktikan kejahatan yang didakwakan terhadap terdakwa bersalah atau tidak bersalah. Apabila hasil pembuktian dengan alat – alat bukti yang ditentukan oleh undang –

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

undang tidak cukup kuat membuktikan kesalahan yang didakwakan terhadap si terdakwa maka si terdakwa dibebaskan dari hukuman. Sebaliknya, jika kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat – alat bukti yang sah dalam pasal 184 KUHAP maka terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dapat dijatuhkan hukuman.

Dalam kontek hukum pidana, pembuktian yaitu inti dari persidangan suatu perkara pidana sebab yang ingin didapatkan yaitu kebenaran materil yang dilaksanakan dimulai dari tahap penyelidikan untuk menemukan bisa tidaknya dilaksanakan penyidikan demi membuat titik terang dari tindak pidana sehingga menemukan tersangka yang bersalah.

Munir Fuady menyatakan sistem pembuktian memiliki arti memberi atau melihatkan bukti, melaksanakan suatu kebenaran, menandakan, menyaksikan dan meyakinkan. Disisi lain R. Subekti mengemukakan pembuktian yaitu untuk meyakinkan hakim mengenai kebenaran dalil – dalil yang telah dijabarkan didalam suatu sengketa atau permasalahan.(Os. Hiarieeja, 2012, pp. 2-3)

Menurut Munir Fuady hampir semua di Negara manapun meletakkan pembuktian ada pada pundak jaksa penuntut umum (JPU) yang dimana berdasarkan teori pembuktian hukum menentukan dengan jelas dan tegas kepundak siapa suatu beban pembuktian (*burden of proof, burden of producing evidence*) harus diberikan.Hal tersebut demi menentukan secara langsung bagaimana akhir dari suatu proses hukum di pengadilan, misalnya dalam kasus perkara perdata yang para pihaknyasama – sama tidak dapat memberikan pembuktian dalam perkaranya. Sehingga apabila beban tersebut dijatuhkan kepundak sipenggugat yang tidak bisa memberikan pembuktian dalam perkaranya

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

maka diakui kalah meski tergugat juga belum bisa memberikan pembuktiannya.Oleh karena itu dalam menentukan ke pundak siapa beban pembuktian harus diletakkkan, hukum haruslah berhati – hati dan adil dalam penerapannya.(Fuady, 2006, p. 48)

Tujuan dan guna pembuktian bagi setiap pihak yang berhubungan dalam proses pemeriksaan dipersidangan terdiri atas :(Sasangka & Rosita, 2003, p. 13)

a) Bagi penuntut umum pembuktian sebagai bentuk usaha demi mayakinkan hakim berlandaskan alat bukti yang telah ada supaya mengungkapkan terdakwa benar bersalah sesuai dalam surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.
b) Bagai terdakwa maupun penasehat hukum, pembuktian sebagai bentuk usaha sebaliknya agar dapat meyakinkan hakim berlandaskan alat bukti yang ada sehingga terdakwa dapat dibebaskan dari penuntutan hukum maupun setidaknya meringankan pidananya.
c) Bagi hakim atas dasar pembuktian tersebut dengan terdapatnya alat – alat bukti dipersidangan yang berasal dari penuntut umum maupun dari penasehat hukum terdakwa yang dibuat berdasarkan untuk mdendapatkan keputusan

Sehingga sependapat dengan Djoko Sarwoko yang menyatakan sistem pembuktian memilik tujuan :(Prakoso D. , 1987, p. 2)

a) Mengetahui berbagai letak suatu hasil dari pembuktian dalam sebuah permasalahan yang diselidiki.
b) Efek dari kekuatan pembuktian bisa diakui sangat dengan professional untuk memberikan pembuktian kesalahan siterdakwa.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

c) Apakah perlengkapan dalam pembuktian dengan menggunakan alat bukti sangat dibutuhkan kepercayaan seorang hakim.

Pasal 203 ayat (1) KUHAP menjelaskan "yang diperiksa penuntut umum menurut acara pemeriksaan singkat ialah perkara kejahatan atau pelanggaran yang tidak termasuk pada ketentuan pasal 205 KUHAP dan menurut penuntut umum pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana dan sementara". Sedangkan dalam pasal 205 ayat (1) menyatakan "yang diperiksa menurut acara pemerkisaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak – banyaknya Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam acara pemeriksaan lalu lintas jalan".

A. Karim, SH mengatakanpermasalahan diselidiki menurut dalam acara pemeriksaan biasa disebutkan sebagai sebuah perkara tolakkan artinya perkara – perkara yang sangat sulit dan luas yang diajukan Jaksa dalam bentuksurat tolakkan. Perkara yang diperiksa dalam cara pemeriksaan biasa dipastikan dengan syarat – syarat sebagai berikut :(Nasution, 1981, p. 58)

a) Penuntut umum membuat surat pelimpahan perkara ke pengadilan yang berwenang
b) Penuntut umum membuat surat dakwaan
c) Putusan dibuat secara khusus
d) Dibuat berita acara sidang

Ditinjau dari perspektif sistem peradilan pidana perihal pembuktian merupakan suatu hal yang sangat determinan bagi setiap pihak yang terlibat secara

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

langsung dalam proses pemeriksaan perkara pidana khususnya dalam menilai terbukti atau tidak terbuktinya kesalahan terdakwa. Dalam hal pembuktian keterangan korban merupakan hal yang sangat penting dimana korban yang menderita secara jasmani dan rohani sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita. Pada umumnya alat bukti keterangan saksi yaitu alat bukti yang sangat penting pada permasalahan pidana.Dapat disebut permasalahan pidana tidak ada yang lepas pada pembuktian dari keterangan saksi karena kesaksian seorang saksi dapat dianggap sebagai alat bukti yang memiliki nilai kekuatan dalam pembuktian.

Dalam hal terjadinya sebuah tindak pidana dalam hal ini hukum akan melakukan tindakan berdasarkan instrumennya artinya sang penegak hukum yang mana menangani sebuah perkara dari tingkat penyelidikan, tingkat penyidikan dan tingkat penuntutan hingga sampai pemeriksaan oleh pengadilan demi menemukan kebenaran materil yang sebagai tujuan dari hukum itu sendiri. Pada pelaksaan tugasnya menangani sebuah kasus pidana, seorang penyidik maupun penuntut umum harus menjalin ikatan yang bersifat fungsional dan instansional artinya adanya hubungan kerjasama yang bersifat saling mengawasi dalam proses penanganan perkara pidana.

Hukum pembuktian merupakan pemegang peranan penting dalam proses hukum acara pidana dan oleh sebab itu mutlak harus di kuasai oleh pejabat pada semua tingkat pemeriksaan, khususnya penuntut umum yang berwenang menuntut dan dibebani kewajiban membuktikan kesalahan terdakwa. Kegagalan penuntut

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

umum dalam tugas penuntutan banyak tergantung pada ketidak mampuan menguasai teknik pembuktian.Sebaliknya penuntut umum terikat pada ketentuan dan penilaian alat bukti yang ditentukan undang – undang. Penuntut umum juga hakim dan terdakwa maupun penasihat hukumnya tidak boleh sekehendak hati dengan selera sendiri – sendiri dalam menggunakan dan menilai alat bukti di luar dari apa yang telah digariskan undang – undang.

Menurut M. Yahya Harahap, SH ditinjau dari segi hukum acara pidana sebagaimana yang ditentukan dalam KUHAP diatur pula beberapa pedoman dan penggarisan yaitu penuntut umum bertindak sebagai aparat yang diberi kewenangan untuk mengajukan segala daya upaya membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Sebaliknya terdakwa atau penasihat hukum mempunyai hak untuk melemahkan dan melumpuhkan pembuktian yang diajukan penuntut umum sesuai dengan cara – cara yang dibenarkan undang – undang, bisa berupa sangkalan atau bantahan yang beralasan, dengan saksi yang meringankan atau saksi a decharge.

Berdasarkan kasus posisi yang telah dilakukan oleh terdakwa Antonius Rajagukguk Als Anton terhadap anak korban PLyaitu tindak pidana persetubuhan sangat melanggar kaidah hukum serta kesusilaan. Jaksa Penuntut Umum harus menuntut terdakwa Antonuis Rajagukguk Als Anton jika terdapat alasan yang cukup membuktikan telah melanggar hukum, hingga Jaksa penuntut umum harus berhati – hati saatmemberikan hukuman pidana kepada terdakwa dikarenakan lebih memperhatikan dan mengutamakan demi terciptanya rasa keadilan yang berkembang agar tercapainya keamanan dan ketertiban didalam masyarakat.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Supaya pelaksanaan penuntutan bisa berhasil maka jaksa penuntut umum harus melakukan proses pembuktian terlebih dahulu sesuai dengan prosedur didalam KUHAP gunamembuktikan dakwaan yang didakwakan kepada seorang terdakwa agar pada saat memberikan tuntutannya kepada terdakwa tidak terjadinya ketimpangsiuran atau kesalahan.

Dari hasil wawancara penulis terhadap Didik Haryadi, SH selaku jaksa yang menangani perkara tersebut menjelaskan proses pembuktian yang dilakukan dalam perkara tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umurNo. Reg. Perkara : PDM- 05/PEKAN/01/2019 dimulai dari pada saat pembacaan surat dakwaan terhadap terdakwa Antonius Rajagukguk Als Anton, selanjutnya pemeriksaan saksi – saksi termasuk saksi korban anak PL yang akan memberikan keterangan mengenai tindak pidana yang dialaminya agar penuntut umum dapat membuktian pasal dakwaan mana yang disangkakan kepada terdakwa dapat terbukti, kemudian pemeriksaan terhadap surat*Visum Et Repertum* dan pemeriksaan terdakwa serta barang bukti didapat dalam perkara tersebut yang dapat menentukan apakah benar terdakwa telah melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap korban anak dibawah umur sehingga penuntut umum dapat mengambil sikap dari hasil keterangan saksi – saksi, surat *Visum Et Repertum*untuk memberikan tuntutan terhadap terdakwa.

Sebelum melakukan tuntutan dipersidangan, jaksa penuntut umum sebelumnya membuat rentut (rencana tuntutan) yang dari hasil wawancara terhadap jaksa penuntut umum bapak Didik Haryadi, SH yang memberikan keterangan bahwa sebelum memberikan tuntutan yang harus dilakukan seorang

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

jaksa penuntut umum adalah membuat rentut (rencana tuntutan) yang akan diajukan kepada kasi tindak pidana umum untuk memberikan tuntutan pidana yang akan diberikan kepada terdakwa, kemudian setelah mendapatkan rentut dari kasi pidum selanjutnya rentut tersebut diajukan kepada bapak Kajari Pekanbaru yang mana dari hasil rentut yang diberikan bapak Kajari tersebutlah yang akan dijadikan tuntutan pidananya oleh jaksa penuntut umum.

Sebelum melaksanakan tuntutan, penuntut umum wajib memberi pertimbangan mengenai berat ringannya suatu tuntutannya yang diusulkan pada terdakwa karena mengingat pada prakteknya sering ditemui sikorban juga ikut jadi penyebab terjadi perbuatan jahat.Dalam hal tersebut viktimologi memberi deskripsi tentang penyebab terjadi korban atau munculnya korban dan akibat yang timbul dalam suatu perbuatan pidana tersebut.

Hasil wawancara kepada jaksa penuntut umum bapak Didik Haryadi, SH menjelaskan yang menjadi pertimbangan dalam memberikan tuntutan terhadap terdakwa Antonius Rajagukguk Als Anton yaitu karena siterdakwa sudahngerusak masa depan anak korban PL yang seorang siswi Sekolah Menengah Akhir harus berhenti sekolah dikarenakan anak korban PL sedang mengandung. Selain itu yang menjadi pertimbangan jaksa penuntut umum yaitu dikarenakan orang tua anak korban PL tidak mau melakukan perdamaian terhadap terdakwa Antonius Rajagukguk Als Anton sehingga pada saat mengajukan rentut (rencana tuntutan) memberikan tuntutan terhadap terdakwa yaitu pidana penjara selama 6 (enam) tahun penjara dengan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subside 6 (enam) bulan penjara.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Sementara dari wawancara peneliti terhadap Kasi Pidum bapak Roby Harianto, SH menjelaskan yang menjadi pertimbangan dalam memberikan tuntutan pidana terhadap terdakwa Antonius Rajagukguk Als Anton yaitu juga dikarenakan anak korban PL masih anak dibawah umur yang mana anak dibawah umur yaitu dilindungi oleh undang – undang perlindungan anak dan juga anak korban PL tidak mengetahui apa – apa mengenai hal tentang persetubuhan. Sehingga dalam hal ini memberikan tuntutan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun penjara dengan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subside 6 (enam) bulan penjara yang mana dalam hal tuntutan tersebut sudah memenuhi rasa keadilan.

Berdasarkan fakta – fakta yang terbukti di persidangan seperti keterangan saksi – saksi, keterangan terdakwa, surat Visum Et Repertum Nomor : VER/630/XI/KES.3/2018/RSB tanggal 14 November 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Joster Hartanto di Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru menyatakan terdapat robekan lama pada alat kemaluan korban dan terdakwa tidak ada merasa keberatan dan telah membenarkan. Dalam perkara tersebut penuntut umum menuntut terdakwa Antonius Rajagukguk Als Anton telah terbukti secara sah dan meyakinkan salah telah melakukan tindak pidana "Persetubuhan terhadap Anak" dan "Membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orang tuanya" yang diatur dan diancam dengan Pasal 81 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas UU RI nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

undang RI nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang RI nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 332 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang mana terdakwa dituntut pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dengan dikurangi lamanya terdakwa ditangkap dan penahanan yang telahdilalui terdakwa dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dengan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.

Dari hasil wawancara penulis kepada terdakwa Antonius Rajagukguk Als Anton mengatakan bahwa sangat keberatan dengan tuntutan yang diberikan oleh penuntut umum terhadap dirinya yang mana dalam kasus ini terdakwa dan anak korban PL melakukan persetubahn tersebut dengan berlandaskan atas dasar suka sama suka tanpa adanya unsure paksaan ataupun menggunakan kekerasan terhadap anak korban PL.

Sebelum memberikan tuntutan pidana terhadap seorang terdakwa, jaksa penuntut umum harus membuktikan terlebih dahulu dakwaan mana yang dari dakwaan yang diberikan kepada seorang terdakwa yang dapat memenuhi unsure – unsure dari dakwaan tersebut. Menurut Prof. Hamel, pidana dalam hukum positif sebagai suatu penderitaan yang dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana sebagai pertanggung jawaban dari pelanggaran yang telah diperbuatnya.

Menurut jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri Pekanbaru bapak Didik Haryadi, SH menjelaskan bahwa pada pembahasan dalam tuntutan Nomor. Reg. Perkara : PDM – 05/PEKAN/01/2019 enggak ada didapat alasan yang bisa menghilangkan kesalahan dari terdakwahingga perilaku terdakwa sanggup

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

dipertanggungjawabakan sebab unsure – unsure dalam dakwaan yang didakwakan terhadap terdakwa terpenuhi. Yang dalam hal ini dakwaan yang didakwakan terhadap terdakwa yaitu dakwaan kumulatif yang artinya dakwaan tersebut telah terbukti semuanya telah dilakukan oleh terdakwa.

Dalam tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur berdasarkan tuntutan Nomor. Reg. Perkara : PDM – 05/PEKAN/01/2019 terdapat beberapa peranan dan penyebab utama dalam terjadinya perbuatan persetubuhan tersebut yang dalam hal ini DiDik Haryadi, SH dan kasi Pidum Roby Harianto, SH menjelaskan bahwa peranan dan penyebab utama dalam terjadinya tindak pidana persetubuhan terhadap anak korban PL yaitu dikarenakan anak korban PL tidak menolah pada saat diajak oleh terdakwa Antonius Rajagukguk Als Anton untuk pergi ke Hotel dan pergi menginap dirumah saudara terdakwa dan juga pada saat diajak untuk melakukan hubungan suami istri, anak korban PL tidak ada menolak sama sekali dan justru juga menikmati perbuatan yang dilakukannya bersama dengan terdakwa.

Selama dipersidangan seorang jaksa penuntut umum juga harus memberi perlindungan bagi anak korban terjadinya pidana persetubuhan tersebut dari hasil wawancara kepada Didik Haryadi, SH menjelaskan bahwa bentuk perlindungan yang diberikan terhadap anak korban PL dalam perkara tindak pidana persetubuhan tersebut yaitu dengan berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak yang dalam perkara tersebut jaksa penuntut umum memberikan atau

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

menghadirkan pendampingan terhadap anak korban PL yaitu orang tuanya sendiri diselama tingkat pemeriksaan dipersidangan.

Sementara hasil wawancara terhadap terdakwa Antonius Rajagukguk Als Anton menjelaskan bahwa keluarga terdakwa juga memberikan bentuk perlindungan terhadap anak korban PL yaitu dengan memenuhi atau membiayai kebutuhan anak korban PL dan terdakwa juga berjanji akan menikahi anak korban PL ketika sudah keluar dari masa penahanan.

Analisa peneliti dalam masalah iniadalah bahwa jaksa penuntut umum dalam melakukan proses pembuktian telah sesuai dengan aturan yang diatur dalam KUHAP dan mengenai dakwaan yang diberikan kepada terdakwa telah terbukti dilakukan oleh terdakwa akan tetapi mengenai penjatuhan tuntutan hukuman yang diberikan oleh penuntut umumterhadap terdakwa tidak memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa karena penuntut umum memberikan tuntutannya terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun penjara, memang didalam persidangan terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana "persetubuhan dan membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa tanpa izin dari orangtuanya" akan tetapi terdakwaAntonius Rajagukguk Als Anton dan anak korban PL melakukan tindak pidana persetubuhan tersebut atas dasar karena suka sama suka tanpa melakukan ancaman kekerasan maupun paksaan terhadap anak korban yang mana dalam hal ini anak korban tahu akan terjadi tindakan yang tidak baik yang akan dialaminya sebab terdakwa Antonius Rajagukguk Als Anton mengajak anak korban PL untuk menginap di rumah saudara terdakwa dan juga pergi ke hotel akan tetapi anak korban tidak menolak ajakan tersebut, sehingga dalam hal ini

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

anak korban memang tidak ada melakukan apapun tapi dengan sikapnya yang tidak menolak ajakan terdakwa Anonius Rajagukguk Als Anton justru mendorong anak korban PL sendiri untuk menjadi korban dimana anak korban PL menuruti semua yang dikatakan oleh terdakwa Antonius Rajagukguk Als Anton untuk menginap disebuah hotel tanpa adanya paksaan dan ancaman, maka dalam hal ini anak korban PL dapat dikategorikan sebagai *Participating victims* dan korban PL juga dapat dikategorikan sebagai *provocative victims* yang mana korban yang secara aktif mendorong dirinya menjadi korban dengan tidak menolak perbuatan asusila yang dilakukan oleh terdakwa terhadapnya tetapi anak korban justru menikmati dan mau melakukannya berulang kali kepada terdakwa.Sehingga dalam hal ini tuntutan yang diberikan kepada terdakwa tidak memenuhi rasa adil bagi terdakwa dan penuntut umum hanya memperhatikan akibat yang ditimbulkan terhadap anak korban saja, tetapi tidak memperhatikan peranan perbuatan anak korban dalam terjadinya perbuatan persetubuhan tersebut.

B. Hambatan Dalam Proses Pembuktian Oleh Penuntut Umum Untuk Melakukan Penuntutan Dilihat Dari Peran Korban Dalam Terjadinya Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Dibawah Umur (Studi Kasus Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-O5/PEKAN/01/2019)

Untuk memperoleh suatu kebenaran atas suatu peristiwa yang terjadi di perlukan suatu proses kegiatan yang sistematis dengan menggunakan ukuran dan pemikiran yang layak dan rasional. Kegiatan pembuktian dalam KUHAP pada

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

dasarnya diharapkan untuk memperoleh kebenaran dalam batasan – batasan yuridis bukan dalam batasan yang mutlak karena kebenaran yang mutlak sukar diperoleh.

Pembuktian dalam KUHAP dimaksud dengan upaya agar memperoleh kebenaran dengan menggunakan alat bukti barang bukti untuk mendapatkan kepercayaan mengenai betul salahnyatindakan pidana yang didakwakan dan untuk mengetahui apakah terdakwa memiliki kesalahan.(Muhammad R. , Hukum Acara Pidana Kontemporer, 2007, p. 185)

Tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur adalah suatu tindakan pidana kesusilaan palain banyak terjadi dilingkungan masyarakat.Perbuatan tersebut sangat membutuhkan perhatian serius dari aparat penegak hukum maupun masyarakat lainnya demi terwujudnya rasa kenyamanan dan ketentraman bersama.

Jaksa yang merupakan penuntut umum yang mempunyai tugas sebagaipembuat surat tuntutan pidana dari hasil proses pembuktian di persidangan. Pembuatan tuntutan pidana bagi seorang terdakwa yaitu bagian dari proses penuntutan yang paling penting agar menunjukkan jenis pidana maupun berat ringannya pidana yang diberikan kepada seorang terdakwa hingga bisa menciptakan keadilan untuk terdakwa, korban maupun masyarakat.

Dalam suatu proses pembuktian yang harus dikerjakan jaksa penuntut umum pada saat sidang pembuktian maka akan menemukan hambatan – hambatan. Berkaitan hambatan – hambatan yang timbul pada saat proses pembuktian, Jaksa

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Didik Haryadi, SH., memberikan keterangan bahwa hambatan yang muncul diantaranya :

1) Berkas acara dari penyidik tidak menjelaskan secara lengkap mengenaiperan korban terjadinya tindak pidana tersebut. Sehingga masih ada kekurangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat penyidik yang mana di BAP tersebut masih belum menjelaskan secara jelas bagaimana peran korban anak saat terjadinya tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur.
2) Belum adaaturanyang lebih tegas mengenai peranan korban, hingga permasalahan ini menjadi sebuah hambatan oleh penuntut umum saat memberi pertimbangan mengenai penuntutannya bagi terdakwa, dimana penuntut umum selama ini memberikan pertimbangan secara objektif yang merupakan pertimbangan yang diberikan penuntut umumbersumber dariperaturan yang telah diatur oleh undang – undang yang berlaku dan juga pertimbangan secara subjektif yang merupakan pertimbangan yang diberikan penuntut umum karena hati nurani serta penilaian maupun keyakinan hakim itu sendiri. Kepercayaan seorang jaksa sangat perlu dalam menilai peran korban atau posisi dari korban terjadi suatu tindak pidana, kepercayaan tersebut harus didorong dengan alat bukti yang sah, juga pemahaman maupun kesanggupan yang sangat pasti untuk melihat peranan atau posisi dari korban itu sendiri.
3) Kurangnya partisipasi korban maupun saksi dalam proses persidangan.

Pada umumnya hambatan – hambatan yang sering didapat yaitu sikorban tidak mau hadir selama dipersidangan sehingga jaksa penuntut umum sangat kesulitan dalam meminta keterangan mengenai terjadinya tindak pidana

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

persetubuhan yang menimpa dirinya karena dalam hal ini korban juga merupakan anak di bawah umur.Korban juga merasa malu dan sulit memberikan keterangan yang sebenarnya pada saat proses persidangan Sehingga sulit bagi jaksa penuntut umum untuk menggali keterangan korban mengenai tindak pidana yang dialaminya.

Dari wawancara kepada bapak Didik Haryadi, SH menjelaskan ada beberapa upaya yang dapat dilakukan agar hambatan – hambatan tersebut dapat diatasi yaitu :

a) Berkas acara dari penyidik yang tidak menjelaskan secara lengkap peranan korban dalam terjadinya tindak pidana seharusnya dikembalikan lagi kepada penyidik utuk dilengkapi lagi agar jelas mengetahui mengenai peran korban anak sehingga terjadi tindak pidana persetubuhan.
b) Menghadirkan seorang pendamping untuk mendampingi anak korban selama proses persidangan agar dapat memberikan keterangan yang benar sehingga jaksa penuntut umum dapat menemukan titik terang dalam terjadinya tindak pidana persetubuhan anak dibawah umur tersebut.

Selain itu hasil wawancara penulis terhadap Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Pekanbaru bapak Roby Harianti, SH menjelaskan bahwa beberapa upaya yang dapat dilakukan agar tidak terjadinya lagi tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur yaitu dengan mengadakan penyuluhan hukum baik terhadap anak – anak disekolahan maupun terhadap masyarakat dikarenakan penyuluhan ini sangat penting dilakukan mengingat pada umumnya tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur tingkat kesadaran hukumnya masih

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

relative rendah, sehingga dengan adanya penyuluhan hukum ini dapat memberikan pemahaman dan kesadaran terhadap anak – anak yang masih dibawah umur dan masyarakat lainnya bahwa tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur merupakan perbuatn yang melanggar hukum serta merugikan diri sendiri dan masyarakat.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Proses pembuktian oleh Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan penuntutan dilihat dari peran korban dalam terjadinya tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur dimulai dari pada saat pembacaan dakwaan, pemeriksaan terhadap para saksi termasuk saksi anak korban, surat *Visum Et Repertum* dan terdakwa serta barang bukti guna mendapatkan titik terang dari permasalahan tersebut yang dimana semuanya saling berhubungan sesuai dengan yang diatur didalam KUHAP.
2. Hambatan – hambatan dalam proses pembuktian oleh jaksa penuntut umum untuk melakukan penuntutan dilihat dari peran korban dalam terjadinya tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur.
   a. Berkas acara penyidikan sering belum lengkap dan kurang menjelaskan lebih rinci tentang peranan korban dalam terjadinya tindak pidana tersebut, sehingga sangat berpengaruh terhadap dakwaan yang akan dibuat oleh jaksa penuntut umum juga akan menyulitkan pada jaksa penuntut umum untuk melakukan proses pembuktian di persidangan.
   b. Kurangnya partisipasi korban dalam proses persidangan seperti korban tidak hadir dalam persidangan sehingga jaksa penuntut umum sangat sulitdalam memintai keterangan tentangkejadian tindak pidana persetubuhan yang dialaminya.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

B. Saran

Dari kesimpulan diatas, penulis memberikan saran yang dapat dijadikan sebagai masukkan yakni :

1. Kepada Jaksa penuntut umum pada saat penuntutan seharusnya lebih memperhatikan hubungan antara korban dan terdakwa dan juga harus lebih berdasarkan dari hasil keterangan – keterangan pembuktian yang didapatkan dari persidangan sehingga dalam melakukan tuntutan pidananya agar dapat tercapai kebenaran materil sehingga terciptanya rasa keadilan bagi terdakwa, korban maupun masyarakat.
2. Jaksa penuntut umum harus lebih teliti lagi dalam memeriksa berkas perkara yang diberikan oleh penyidik kepolisian agar pada saat pemeriksaan berkas tersebut sudah lengkap dan menjelaskan bagaimana peran korban sehingga lebih mudah memahami perkara tersebut dan juga harus memahami mengenai permasalahan viktimologi sebab masalah peran korban sebenarnya bukan lagi masalah baru karena sudah sering terjadi dan banyak diacuhkan oleh aparat penegak hukum terutama jaksa penuntut umum dan harus lebih sering melakukan sosialisasi kepada masyarakat baik disekolah – sekolah maupun dilingkungan tempat tinggal masyarakat demi memberikan pemahaman terhadap masyarakat awam mengenai pentingnya untuk mencegah terjadinya tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur demi menciptakan masa depan yang cerdas dan cerah terhadap anak untuk generasi yang lebih baik.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Ali, Mahrus, *Dasar Dasar Hukum Pidana*, Penerbit : Sinar Grafika, 2012.

Anwar, Yesmil dan Danang, *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen, dan Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukim di Indonesia)*, Penerbit : Widya Padjajaran, Bandung, 2009.

Fuady, M, *Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata*. Penerbit : PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.

Gosita, Arif, *Masalah Korban Kejahatan*, Penerbit : Akademika Presindo, Jakarta, 1993.

Hamzah, Prof. Dr. Jur. Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Penerbit : Sinar Grafika, Jakarta, 2016.

Hariri, Wawan Muhwan, *Penghantar Ilmu Hukum*, Penerbit : Pustaka Setia, Jakarta, 2012.

Kaligus, O.C., *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa Dan Terpidana*, Penerbit : P.T Alumni, Jakarta, 2006.

Kansil, C.S.T., *Penghantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Penerbit : Balai Pustaka, Jakarta, 1986.

Manan, Abdul, *Aspek Aspek Pengubah Hukum*, Penerbit : Kencana, Jakarta, 2005.

Mansur, D. M., & Gultom, E, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Penerbit : PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2007.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Muhammad, Dr. Rusli, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Penerbit : PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.

Muladi, *Ham dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Penerbit : Universitas Diponegoro, Semarang, 2002.

Os. Hiarieeja, E, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Penerbit : Erlangga, Jakarta, 2012.

Prakosa, Djoko, *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim Dalam Proses Hukum Acara Pidana*, Penerbit : Bina Aksara, Jakarta, 1987.

Prakos, J., & Murtika, I.K, *Mengenai Lembaga Kejaksaan di Indonesia*, Penerbit : Bina Aksara, Jakarta, 1987.

Prodjodikoro, W, *Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Penerbit : Rafika Aditama, Bandung, 2002.

----------, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Penerbit : Sumur Bandung, Jakarta, 1967.

R. Soesusilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Islam (KUHP)Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal)*, Penerbit : Politeia, Bogor, 1995.

Sahetapy, J., *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*, Penerbit : Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1987.

Sasangka, H.. & Rosita, L., *Hukum Pembuktian dalam Praktek Perkara Pidana*, Penerbit : Mandar Maju, Bandung, 2003.

Soekanto, S, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Penerbit : Rajawali Pers, Jakarta, 1987.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Suharso, *Penuntut Dalam Praktek Pidana*, Penerbit : Sinar Grafika, Jakarta, 2006.

Sunarso, Siswanto, *Victimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Penerbit : Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Waluyo, B, *Pidana dan Pemidanaan*, Penerbit : Sinar Grafika, Jakarta, 2000.

----------, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Penerbit : Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Yulia, Rena, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Penerbit : Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010.

B. Peraturan Perundang-undangan

Redaksi Sinar Grafika, *Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana dan Kitab Undang – undang Hukum Pidana*, Jakarta, : Sinar Grafika.

Moeljatno, (2008), *Kitab Undang – undang Hukum Pidana*, Jakarta : Bumi Aksara.

Undang –undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan saksi dan korban.

Undang – undang RI Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

SEJA Nomor : SE-013/A/JA/12/2011 tanggal 29 Desember 2011 Tentang Pedoman Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Umum.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan korban.

C. Artikel dan Jurnal

Endang Suparta (2014). Bantuan Hukum Mewujudkan Akses Masyarakat Miskin Terhadap Keadilan di Indonesia. *Mahkamah*, 181-192.

Kristiani, N.M, (2014), Kejahatan Kekerasan seksual (perkosaan) ditinjau dari Persektif Kriminologi, *Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Udayana, Denpasar, Bali*, 378-379.

Yudikrismen (2009). Penegakan Hukum Terhadap Corporate Crime, *Ilmu Hukum*, 110-119.

Zulkarnain (2009). Analisis Terhadap Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Sistem Hukum Pidana Positif Indonesia, *Ilmu Hukum*, 129-136.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :